




LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keterangan Penelitian

 PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
KECAMATAN JEMBRANA
KANTOR PERBEKEL DESA BATUAGUNG
Jln. Patih Jelantik No 2, Telpn 41980. Negara



SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor :070/2244 / X /2024

Yang bertanda tangan dibawah ini kami Perbekel Desa Batugung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, menerangkan bahwa:


Nama	: I GUSTI AYU KADE WIKA IRMAYANTI
Nomor Mahasiswa	: 2017051079
Program Studi	: Akuntansi
Lemabaga/Universitas	: Universitas Pendidikan Ganeha
Tujuan dan Keperluan	: Mengadakan Penelitian dan Survey
Lama Penelitian	: 7 Oktober – 18 Oktober 2024

Memang benar saudara tersebut diatas telah mengadakan penelitian dan survey lapangan untuk pembuatan karya tulis ilmiah yang berjudul Analisis Dampak Kasus Korupsi Pejabat Pajak terhadap Kepercayaan masyarakat dan Keadilan Perpajakan yang dilaksanakan di Banjar Petanahan, Desa Batuagung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan kemana mestinya.

Batuagung, 10 Oktober 2024
PERBEKEL DESA BATUAGUNG,

INYOMAN SUDARMA


Lampiran 2. Surat Ijin Penelitian



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS EKONOMI
Jalan Udayana No. 11 Singaraja-Bali. Telepon : (0362) 26830
Website : <http://www.fe.undiksha.ac.id/>

Nomor : 2210/UN48.13.1/DL/2024 Singaraja, 8 Oktober 2024
 Lamp. : -
 Hal : *Permohonan Wawancara/Data dan Penelitian*

Kepada Yth. Kepala Desa Batuagung Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana

Dengan Hormat,


Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha menerangkan bahwa mahasiswa/i tersebut dibawah ini :

Nama	: I Gusti Kade Wika Irmayanti
NIM.	: 2017051079
Fakultas	: Ekonomi
Prodi.	: S1 Akuntansi
Kontak	: 085738436428


Bermaksud mengadakan penelitian lapangan untuk menempuh atau menyusun tugas akhir, skripsi dan melengkapi tugas lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon izin agar mahasiswa kami dapat diterima dan diberikan data di tempat yang Bapak/Ibu/Sdr. Pimpin.

Demikian surat ini kami buat agar bisa digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Ni Made Suci
NIP. 196810291993032001



Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia

Lampiran 3 Instrumen Penelitian

A. Pedoman Instrumen Dokumentasi

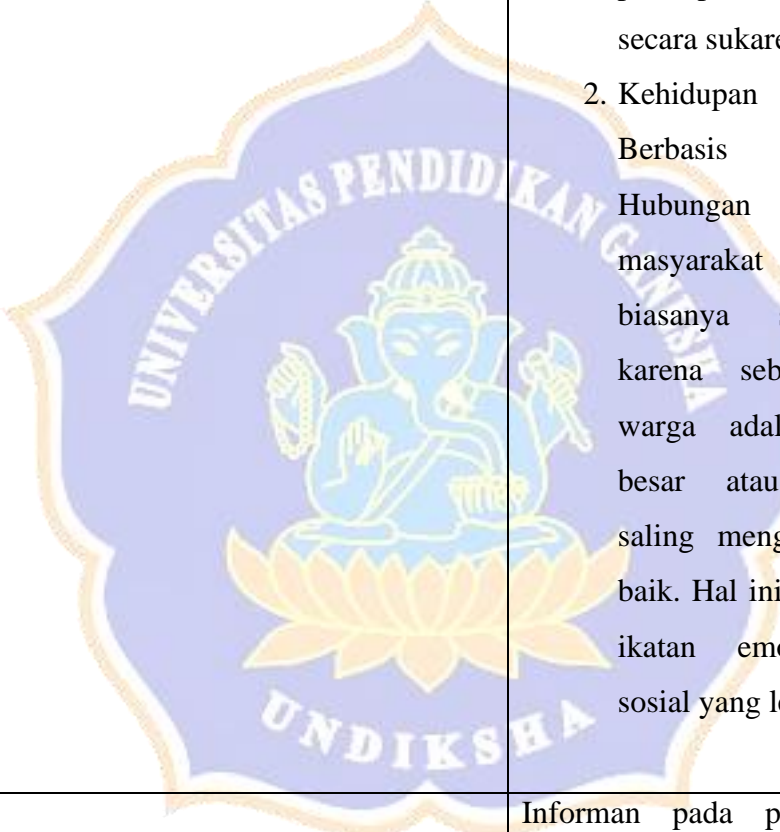
Pedoman instrument dokumentasi ini dibuat dalam rangka melaksanakan penelitian di Desa Batuagung yang berjudul:

**ANALISIS DAMPAK KASUS KORUPSI PEJABAT PAJAK
TERHADAP KEPERCAYAAN MASYARAKAT DAN KeadILAN
PERPAJAKAN (STUDI KASUS PADA KASUS KORUPSI PEJABAT
PAJAK RAFAEL ALUN TRISAMBODO)**

Instrument dokumentasi ini hanya digunakan sebagai panduan dalam melaksanakan penelitian. Dalam pelaksanaan penelitian di lapangan pedoman ini akan dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat melaksanakan dokumentasi di tempat penelitian.

NO	DIMENSI YANG DI DOKUMENTASI	HASIL DOKUMENTASI
1.	Keadaan Geografis Desa Batuagung (keadaan Desa)	Luas wilayah Desa Batuagung adalah 1.878,00 Ha. Luas tanah sawah 15,00 Ha, tanah kering 695,10 Ha, tanah perkebunan 289,00 Ha, dan tanah hutan 878,00 Ha. Iklim Desa Batuagung memiliki suhu rata-rata harian 30,00°C, curah hujan 30,00 mm, dan jumlah bulan hujan 6,00 bulan.
2.	Keadaan Demografis Desa Batuagung (agama, pendidikan, umur, pekerjaan)	Jumlah penduduk usia 3-6 tahun yang masuk TK dan Kelompok Bermain Anak 134 Orang, Jumlah SLTA/ sederajat 1900 Orang, Jumlah penduduk sedang D-325 Orang, Ju

		<p>Batuagung tahun 2021)</p> <p>* Pekerjaan : A. Pengangguran</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah angkatan kerja (Penduduk usia 18-56 tahun) 2. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang masih sekolah dan tidak bekerja 3. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang menjadi ibu rumah tangga 4. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja penuh 5. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja tidak tentu 6. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan tidak bekerja 7. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacar dan bekerja
3.	<p>Aktivitas yang dilakukan sehari-hari oleh masyarakat Desa Batuagung</p>	<p>aktivitas yang dilakukan sehari-hari oleh masyarakat desa batuagung adalah bertani dan berkebun</p>
4.	<p>Pola hubungan antar masyarakat di Desa Batuagung</p>	<p>Di Desa Batuagung, pola hubungan antar masyarakat umumnya ditandai oleh adanya solidaritas komunal yang kuat dan tradisi gotong royong. Berikut beberapa ciri umum dari pola hubungan tersebut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gotong Royong: Sebagai salah satu prinsip dasar

		<p>masyarakat pedesaan di Indonesia, gotong royong sangat dipegang teguh. Kegiatan seperti membangun rumah, memperbaiki jalan, atau mengadakan acara adat sering kali melibatkan partisipasi banyak warga secara sukarela.</p> <p>2. Kehidupan Sosial Berbasis Keluarga: Hubungan antar masyarakat di desa biasanya sangat erat karena sebagian besar warga adalah keluarga besar atau setidaknya saling mengenal dengan baik. Hal ini menciptakan ikatan emosional dan sosial yang lebih dalam.</p>
5.	Masyarakat Desa Batuagung yang menjadi sumber informasi dalam penelitian	Informan pada penelitian ini yaitu 15 orang wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Desa Batuagung, Kec. Jembrana, Kab. Jembrana, Bali.

B. Pedoman Instrumen Wawancara

Pedoman instrumen wawancara ini dibuat dalam rangka melaksanakan penelitian di Desa Batuagung yang berjudul:

**ANALISIS DAMPAK KASUS KORUPSI PEJABAT PAJAK
TERHADAP KEPERCAYAAN MASYARAKAT DAN KEADILAN
PERPAJAKAN (STUDI KASUS PADA KASUS KORUPSI PEJABAT
PAJAK RAFAEL ALUN TRISAMBODO)**

Instrumen wawancara ini hanya digunakan sebagai panduan dalam melaksanakan penelitian. Dalam pelaksanaan penelitian di lapangan pedoman ini akan dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat melaksanakan wawancara di tempat penelitian.

I. Identitas Narasumber (1)

- a. Nama : I Nyoman Sudarma
- b. Umur : 56 Tahun
- c. Jenis Kelamin : Laki-laki
- d. Agama : Hindu
- e. Alamat : Banjar Batuagung
- f. Pekerjaan/Profesi : Kepala Desa Batuagung

II. Instrumen Wawancara

NO	DIMENSI YANG DI WAWANCARAI	HASIL DOKUMENTASI
1.	<p>Pengantar dan Latar Belakang</p> <p>1. Pengantar Profesi</p> <p>Bisakah Anda menjelaskan jenis usaha atau profesi Anda serta seberapa lama Anda telah terlibat dalam kegiatan perpajakan?</p> <p>2. Pemahaman tentang Kasus</p> <p>Apakah Anda mengetahui tentang kasus korupsi pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo? Jika ya,</p>	<p>1. Saya seorang pegawai Kepala Desa Batuagung. Saya terlibat dalam kegiatan perpajakan sebagai wajib pajak orang pribadi dengan melaporkan penghasilan saya setiap tahun sesuai dengan ketentuan perpajakan.</p> <p>2. Saya pertama kali mengetahui tentang kasus ini melalui berita</p>

	<p>bagaimana Anda pertama kali mengetahui tentang kasus ini dan apa pemahaman awal Anda tentang situasi tersebut?</p> <p>3. Apakah selama ini penghasilan dilaporkan sesuai dengan aslinya atau tidak?</p>	<p>di televisi. Pemahaman awal saya adalah bahwa Rafael Alun Trisambodo terlibat dalam praktik korupsi yang melibatkan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan pajak, yang tentunya sangat mengecewakan.</p> <p>3. Kalau saya pribadi melaporkan penghasilan lebih rendah untuk menghindari pajak yang lebih tinggi.</p>
2.	<p>Dampak Terhadap Kepercayaan Masyarakat</p> <p>1. Persepsi Terhadap Kepercayaan</p> <p>Bagaimana menurut Anda kasus korupsi ini mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap instansi pajak? Apakah Anda merasa kepercayaan masyarakat terhadap pejabat pajak berkurang?</p> <p>2. Pengaruh Terhadap Kepatuhan Pajak</p> <p>Apakah Anda merasa bahwa kasus ini mempengaruhi kepatuhan Anda dan masyarakat lainnya dalam memenuhi kewajiban pajak? Jika ya, dalam hal apa pengaruh tersebut terlihat?</p> <p>3. Reaksi Masyarakat</p>	<p>1. Kasus korupsi memang berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap instansi pajak. Jika pejabat pajak terlibat dalam korupsi, masyarakat akan merasa tidak yakin bahwa pajak mereka dikelola dengan baik dan transparan.</p> <p>2. Ya, kasus ini mempengaruhi kepatuhan saya dan masyarakat. Kami merasa kurang yakin bahwa pajak yang dibayar akan digunakan dengan benar, jadi ada kecenderungan untuk lebih berhati-hati dalam melaporkan pajak.</p> <p>3. Masyarakat sekitar tampaknya sangat marah dan kecewa.</p>

	<p>Apa reaksi yang Anda amati dari masyarakat sekitar mengenai kasus korupsi ini? Adakah perubahan signifikan dalam pandangan mereka terhadap sistem perpajakan?</p>	<p>Banyak yang mulai meragukan integritas sistem perpajakan dan merasa bahwa ada banyak masalah dalam pengelolaan pajak.</p>
<p>3.</p>	<p>Keadilan Perpajakan</p> <p>1. Persepsi Keadilan</p> <p>Menurut Anda, bagaimana kasus korupsi ini mempengaruhi persepsi Anda tentang keadilan dalam sistem perpajakan di Indonesia? Apakah Anda merasa ada ketidakadilan yang lebih besar setelah kasus ini terungkap?</p> <p>2. Langkah-Langkah Perbaikan</p> <p>Apa langkah-langkah yang menurut Anda perlu diambil untuk meningkatkan keadilan dalam sistem perpajakan setelah kasus korupsi ini? Adakah reformasi yang Anda harapkan?</p> <p>3. Pengawasan dan Penegakan Hukum</p> <p>Bagaimana Anda menilai efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap pejabat pajak setelah kasus ini? Apakah Anda merasa ada perbaikan dalam</p>	<p>1. Kasus korupsi ini memperkuat persepsi saya bahwa ada ketidakadilan dalam sistem perpajakan. Saya merasa bahwa pejabat pajak yang terlibat menunjukkan bahwa sistem ini mungkin tidak adil bagi semua orang.</p> <p>2. Langkah pertama yang perlu diambil adalah memperketat pengawasan terhadap pejabat pajak. Saya juga berharap ada reformasi dalam sistem akuntabilitas untuk memastikan bahwa semua transaksi pajak transparan dan terpantau.</p> <p>3. Saya merasa bahwa pengawasan dan penegakan hukum masih belum cukup efektif. Meskipun ada beberapa perbaikan, namun banyak masyarakat merasa bahwa tindakan tegas terhadap pejabat pajak yang terlibat korupsi masih kurang.</p>

	hal ini?	
4.	<p>Regulasi dan Kebijakan</p> <p>1. Kebijakan Pemerintah</p> <p>Apakah Anda merasa bahwa kebijakan pemerintah saat ini cukup efektif untuk mencegah korupsi di kalangan pejabat pajak? Adakah perubahan kebijakan yang Anda rasa diperlukan?</p> <p>2. Dukungan dan Transparansi</p> <p>Apa bentuk dukungan atau transparansi yang menurut Anda perlu ditingkatkan oleh pemerintah untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan?</p>	<p>1. Saya merasa bahwa kebijakan pemerintah saat ini belum cukup efektif. Perlu ada perubahan dalam kebijakan yang menekankan pada transparansi dan akuntabilitas yang lebih ketat untuk pejabat pajak.</p> <p>2. Pemerintah perlu meningkatkan transparansi dengan menyediakan laporan yang jelas dan terbuka mengenai penggunaan dana pajak. Ini akan membantu masyarakat melihat bagaimana pajak mereka digunakan.</p>
5.	<p>Kesejahteraan Ekonomi dan Komunitas</p> <p>1. Dampak Ekonomi Lokal</p> <p>Menurut Anda, bagaimana dampak kasus korupsi ini terhadap kesejahteraan ekonomi di komunitas Anda? Apakah Anda melihat dampak negatif yang signifikan?</p> <p>2. Pendidikan dan Kesadaran</p> <p>Apakah Anda merasa bahwa ada cukup informasi atau pendidikan mengenai integritas pajak dan</p>	<p>1. Kasus korupsi ini berdampak negatif pada kesejahteraan ekonomi komunitas kami karena mengurangi kepercayaan pada sistem perpajakan dan investasi. Hal ini menyebabkan penurunan dalam partisipasi ekonomi dan investasi local.</p> <p>2. Saya merasa informasi mengenai integritas pajak dan antikorupsi masih kurang. Kami memerlukan lebih</p>

	<p>antikorupsi di masyarakat Anda? Apa jenis pendidikan tambahan yang Anda rasa diperlukan?</p>	<p>banyak seminar dan workshop yang mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kepatuhan pajak dan dampak korupsi.</p>
6.	<p>Saran dan Penutup</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi untuk Pemerintah <p>Berdasarkan pandangan Anda, apa rekomendasi atau saran yang bisa Anda berikan kepada pemerintah untuk mengatasi dampak kasus korupsi dan memperbaiki sistem perpajakan?</p> 2. Harapan untuk Masa Depan <p>Apa harapan Anda terkait dengan reformasi perpajakan dan pengelolaan pajak di masa depan setelah terjadinya kasus ini?</p> 3. Pernyataan Penutup <p>Apakah ada hal lain yang ingin Anda tambahkan atau sampaikan mengenai dampak kasus korupsi pejabat pajak terhadap kepercayaan masyarakat dan keadilan perpajakan?</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah harus meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan penerimaan pajak. Penerapan sistem pelaporan yang lebih terbuka dan dapat diakses publik akan membantu mengurangi peluang untuk korupsi. 2. Saya berharap reformasi perpajakan akan membawa transparansi yang lebih besar dalam pengelolaan anggaran negara, sehingga masyarakat dapat melihat dengan jelas bagaimana pajak mereka digunakan dan meminimalkan kemungkinan korupsi di masa depan. 3. Saya ingin menekankan bahwa dampak kasus korupsi tidak hanya merusak kepercayaan masyarakat terhadap pejabat pajak, tetapi juga terhadap seluruh sistem pemerintahan. Perlu ada upaya yang konsisten dan terencana untuk memulihkan kepercayaan

		tersebut.
--	--	-----------

I. Identitas Narasumber (2)

- a. Nama : I Gst Agung Komang Gde Adnyana
 b. Umur : 50 Tahun
 c. Jenis Kelamin : Laki-Laki
 d. Agama : Hindu
 e. Alamat : Banjar Batuagung
 f. Pekerjaan/Profesi : Kelian Banjar Batuagung

II. Instrumen Wawancara

NO	DIMENSI YANG DI WAWANCARAI	HASIL DOKUMENTASI
1.	<p>Pengantar dan Latar Belakang</p> <p>1. Pengantar Profesi</p> <p>Bisakah Anda menjelaskan jenis usaha atau profesi Anda serta seberapa lama Anda telah terlibat dalam kegiatan perpajakan?</p> <p>2. Pemahaman tentang Kasus</p> <p>Apakah Anda mengetahui tentang kasus korupsi pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo? Jika ya, bagaimana Anda pertama kali mengetahui tentang kasus ini dan apa pemahaman awal Anda tentang situasi tersebut?</p> <p>3. Apakah selama ini penghasilan dilaporkan sesuai dengan aslinya atau tidak?</p>	<p>1. Saya adalah Kelian Banjar Batuagung. Saya mematuhi kewajiban perpajakan dengan melaporkan penghasilan usaha saya secara berkala.</p> <p>2. Saya membaca tentang kasus Rafael Alun Trisambodo di media sosial. Dari informasi yang saya lihat, tampaknya ada dugaan suap dan gratifikasi yang melibatkan pejabat pajak ini, dan hal ini sangat mengkhawatirkan.</p> <p>3. Saya sendiri sering tidak melaporkan semua pendapatan dari usaha sampingan. Rasa takut terkena pajak lebih besar membuat saya berbohong.</p>

2.	<p>Dampak Terhadap Kepercayaan Masyarakat</p> <p>1. Persepsi Terhadap Kepercayaan</p> <p>Bagaimana menurut Anda kasus korupsi ini mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap instansi pajak? Apakah Anda merasa kepercayaan masyarakat terhadap pejabat pajak berkurang?</p> <p>2. Pengaruh Terhadap Kepatuhan Pajak</p> <p>Apakah Anda merasa bahwa kasus ini mempengaruhi kepatuhan Anda dan masyarakat lainnya dalam memenuhi kewajiban pajak? Jika ya, dalam hal apa pengaruh tersebut terlihat?</p> <p>3. Reaksi Masyarakat</p> <p>Apa reaksi yang Anda amati dari masyarakat sekitar mengenai kasus korupsi ini? Adakah perubahan signifikan dalam pandangan mereka terhadap sistem perpajakan?</p>	<p>1. Saya percaya bahwa kasus korupsi dapat membuat masyarakat merasa skeptis terhadap integritas pejabat pajak. Kepercayaan terhadap instansi pajak berkurang jika tidak ada tindakan tegas terhadap korupsi.</p> <p>2. Kasus korupsi membuat saya merasa kurang percaya pada sistem pajak, sehingga saya menjadi lebih ragu-ragu dalam memenuhi kewajiban pajak saya. Saya khawatir uang pajak mungkin tidak dikelola dengan baik.</p> <p>3. Reaksi yang saya amati adalah peningkatan skeptisisme terhadap sistem perpajakan. Orang-orang mulai bertanya-tanya apakah pajak yang mereka bayar benar-benar digunakan untuk kepentingan umum.</p>
3.	<p>Keadilan Perpajakan</p> <p>1. Persepsi Keadilan</p> <p>Menurut Anda, bagaimana kasus korupsi ini mempengaruhi persepsi Anda tentang keadilan dalam</p>	<p>1. Saya merasa kasus ini menunjukkan adanya ketidakadilan yang lebih besar. Jika pejabat pajak dapat melakukan korupsi, berarti ada masalah mendasar dalam</p>

	<p>sistem perpajakan di Indonesia? Apakah Anda merasa ada ketidakadilan yang lebih besar setelah kasus ini terungkap?</p> <p>2. Langkah-Langkah Perbaikan</p> <p>Apa langkah-langkah yang menurut Anda perlu diambil untuk meningkatkan keadilan dalam sistem perpajakan setelah kasus korupsi ini? Adakah reformasi yang Anda harapkan?</p> <p>3. Pengawasan dan Penegakan Hukum</p> <p>Bagaimana Anda menilai efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap pejabat pajak setelah kasus ini? Apakah Anda merasa ada perbaikan dalam hal ini?</p>	<p>keadilan sistem perpajakan di Indonesia.</p> <p>2. Penting untuk melakukan audit independen secara berkala terhadap pengelolaan pajak. Selain itu, perlu ada penegakan hukum yang lebih tegas bagi pejabat pajak yang terlibat dalam korupsi.</p> <p>3. Pengawasan dan penegakan hukum menunjukkan adanya beberapa kemajuan, tetapi saya merasa perbaikan yang dilakukan belum memadai. Masih banyak celah yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan penyimpangan</p>
4.	<p>Regulasi dan Kebijakan</p> <p>1. Kebijakan Pemerintah</p> <p>Apakah Anda merasa bahwa kebijakan pemerintah saat ini cukup efektif untuk mencegah korupsi di kalangan pejabat pajak? Adakah perubahan kebijakan yang Anda rasa diperlukan?</p> <p>2. Dukungan dan Transparansi</p> <p>Apa bentuk dukungan atau</p>	<p>1. Kebijakan pemerintah yang ada mungkin belum memadai untuk mencegah korupsi secara menyeluruh. Saya rasa perlu ada kebijakan yang lebih tegas dalam hal audit dan pengawasan</p> <p>2. Penting untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi tentang kebijakan perpajakan dan proses audit.</p>

	<p>transparansi yang menurut Anda perlu ditingkatkan oleh pemerintah untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan?</p>	<p>Pemerintah harus lebih terbuka dalam melaporkan hasil audit dan tindakan yang diambil.</p>
5.	<p>Kesejahteraan Ekonomi dan Komunitas</p> <p>1. Dampak Ekonomi Lokal</p> <p>Menurut Anda, bagaimana dampak kasus korupsi ini terhadap kesejahteraan ekonomi di komunitas Anda? Apakah Anda melihat dampak negatif yang signifikan?</p> <p>2. Pendidikan dan Kesadaran</p> <p>Apakah Anda merasa bahwa ada cukup informasi atau pendidikan mengenai integritas pajak dan antikorupsi di masyarakat Anda? Apa jenis pendidikan tambahan yang Anda rasa diperlukan?</p>	<p>1. Dampak negatif yang saya lihat adalah berkurangnya alokasi dana untuk program-program sosial dan infrastruktur. Korupsi mengarah pada penyelewengan dana yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas.</p> <p>2. Ada beberapa upaya yang dilakukan, namun masih banyak warga yang belum sepenuhnya memahami pentingnya integritas pajak. Pendidikan tambahan tentang cara melaporkan pelanggaran pajak dan korupsi akan sangat membantu.</p>
6.	<p>Saran dan Penutup</p> <p>1. Rekomendasi untuk Pemerintah</p> <p>Berdasarkan pandangan Anda, apa rekomendasi atau saran yang bisa Anda berikan kepada pemerintah untuk mengatasi dampak kasus korupsi dan memperbaiki sistem</p>	<p>1. Implementasi teknologi yang lebih canggih dalam sistem perpajakan dapat membantu mengurangi praktik korupsi. Penggunaan sistem e-filing dan audit berbasis data akan mempersempit celah bagi</p>

	<p>perpajakan?</p> <p>2. Harapan untuk Masa Depan</p> <p>Apa harapan Anda terkait dengan reformasi perpajakan dan pengelolaan pajak di masa depan setelah terjadinya kasus ini?</p> <p>3. Pernyataan Penutup</p> <p>Apakah ada hal lain yang ingin Anda tambahkan atau sampaikan mengenai dampak kasus korupsi pejabat pajak terhadap kepercayaan masyarakat dan keadilan perpajakan?</p>	<p>praktik korupsi.</p> <p>2. Harapan saya adalah bahwa sistem perpajakan di masa depan akan menjadi lebih sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat umum. Dengan reformasi yang jelas, wajib pajak akan lebih mudah memenuhi kewajiban mereka tanpa harus melalui proses yang rumit.</p> <p>3. Kasus korupsi seperti ini seringkali menimbulkan rasa pesimis di kalangan masyarakat tentang keadilan perpajakan. Pemerintah harus lebih aktif dalam menunjukkan komitmen mereka terhadap integritas dan transparansi untuk memperbaiki citra tersebut.</p>
--	---	--

I. Identitas Narasumber (3)

- a. Nama : I Putu Rian Nugraha Wirahata
- b. Umur : 29 Tahun
- c. Jenis Kelamin : Laki-laki
- d. Agama : Hindu
- e. Alamat : Banjar Tegalasih
- f. Pekerjaan/Profesi : Karyawan Swasta

II. Instrumen Wawancara

NO	DIMENSI YANG DI WAWANCARAI	HASIL DOKUMENTASI
----	----------------------------	-------------------

1.	<p>Pengantar dan Latar Belakang</p> <p>1. Pengantar Profesi</p> <p>Bisakah Anda menjelaskan jenis usaha atau profesi Anda serta seberapa lama Anda telah terlibat dalam kegiatan perpajakan?</p> <p>2. Pemahaman tentang Kasus</p> <p>Apakah Anda mengetahui tentang kasus korupsi pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo? Jika ya, bagaimana Anda pertama kali mengetahui tentang kasus ini dan apa pemahaman awal Anda tentang situasi tersebut?</p> <p>3. Apakah selama ini penghasilan dilaporkan sesuai dengan aslinya atau tidak?</p>	<p>1. Saya adalah seorang Karyawan Swasta .Saya mematuhi kewajiban perpajakan dengan melaporkan penghasilan usaha saya secara berkala.</p> <p>2. Saya membaca tentang kasus Rafael Alun Trisambodo di media sosial. Dari informasi yang saya lihat, tampaknya ada dugaan suap dan gratifikasi yang melibatkan pejabat pajak ini, dan hal ini sangat mengkhawatirkan.</p> <p>3. Saya melaporkan penghasilan yang lebih sedikit agar mendapatkan bantuan sosial.</p>
2.	<p>Dampak Terhadap Kepercayaan Masyarakat</p> <p>1. Persepsi Terhadap Kepercayaan</p> <p>Bagaimana menurut Anda kasus korupsi ini mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap instansi pajak? Apakah Anda merasa kepercayaan masyarakat terhadap pejabat pajak berkurang?</p> <p>2. Pengaruh Terhadap Kepatuhan Pajak</p> <p>Apakah Anda merasa bahwa kasus ini mempengaruhi kepatuhan Anda</p>	<p>1. Saya percaya bahwa kasus korupsi dapat membuat masyarakat merasa skeptis terhadap integritas pejabat pajak. Kepercayaan terhadap instansi pajak berkurang jika tidak ada tindakan tegas terhadap korupsi.</p> <p>2. Kasus korupsi membuat saya merasa kurang percaya pada sistem pajak, sehingga saya menjadi lebih ragu-ragu dalam memenuhi kewajiban pajak saya. Saya khawatir uang pajak mungkin tidak dikelola</p>

	<p>dan masyarakat lainnya dalam memenuhi kewajiban pajak? Jika ya, dalam hal apa pengaruh tersebut terlihat?</p> <p>3. Reaksi Masyarakat</p> <p>Apa reaksi yang Anda amati dari masyarakat sekitar mengenai kasus korupsi ini? Adakah perubahan signifikan dalam pandangan mereka terhadap sistem perpajakan?</p>	<p>dengan baik.</p> <p>3. Reaksi yang saya amati adalah peningkatan skeptisisme terhadap sistem perpajakan. Orang-orang mulai bertanya-tanya apakah pajak yang mereka bayar benar-benar digunakan untuk kepentingan umum.</p>
3.	<p>Keadilan Perpajakan</p> <p>1. Persepsi Keadilan</p> <p>Menurut Anda, bagaimana kasus korupsi ini mempengaruhi persepsi Anda tentang keadilan dalam sistem perpajakan di Indonesia? Apakah Anda merasa ada ketidakadilan yang lebih besar setelah kasus ini terungkap?</p> <p>2. Langkah-Langkah Perbaikan</p> <p>Apa langkah-langkah yang menurut Anda perlu diambil untuk meningkatkan keadilan dalam sistem perpajakan setelah kasus korupsi ini? Adakah reformasi yang Anda harapkan?</p> <p>3. Pengawasan dan Penegakan Hukum</p>	<p>1. Saya merasa kasus ini menunjukkan adanya ketidakadilan yang lebih besar. Jika pejabat pajak dapat melakukan korupsi, berarti ada masalah mendasar dalam keadilan sistem perpajakan di Indonesia.</p> <p>2. Penting untuk melakukan audit independen secara berkala terhadap pengelolaan pajak. Selain itu, perlu ada penegakan hukum yang lebih tegas bagi pejabat pajak yang terlibat dalam korupsi.</p> <p>3. Pengawasan dan penegakan hukum menunjukkan adanya beberapa kemajuan, tetapi saya merasa perbaikan yang dilakukan belum memadai.</p>

	<p>Bagaimana Anda menilai efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap pejabat pajak setelah kasus ini? Apakah Anda merasa ada perbaikan dalam hal ini?</p>	<p>Masih banyak celah yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan penyimpangan</p>
4.	<p>Regulasi dan Kebijakan</p> <p>1. Kebijakan Pemerintah</p> <p>Apakah Anda merasa bahwa kebijakan pemerintah saat ini cukup efektif untuk mencegah korupsi di kalangan pejabat pajak? Adakah perubahan kebijakan yang Anda rasa diperlukan?</p> <p>2. Dukungan dan Transparansi</p> <p>Apa bentuk dukungan atau transparansi yang menurut Anda perlu ditingkatkan oleh pemerintah untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan?</p>	<p>1. Kebijakan pemerintah yang ada mungkin belum memadai untuk mencegah korupsi secara menyeluruh. Saya rasa perlu ada kebijakan yang lebih tegas dalam hal audit dan pengawasan</p> <p>2. Penting untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi tentang kebijakan perpajakan dan proses audit. Pemerintah harus lebih terbuka dalam melaporkan hasil audit dan tindakan yang diambil.</p>
5.	<p>Kesejahteraan Ekonomi dan Komunitas</p> <p>1. Dampak Ekonomi Lokal</p> <p>Menurut Anda, bagaimana dampak kasus korupsi ini terhadap kesejahteraan ekonomi di komunitas Anda? Apakah Anda melihat dampak negatif yang signifikan?</p>	<p>1. Dampak negatif yang saya lihat adalah berkurangnya alokasi dana untuk program-program sosial dan infrastruktur. Korupsi mengarah pada penyelewengan dana yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan</p>

	<p>2. Pendidikan dan Kesadaran</p> <p>Apakah Anda merasa bahwa ada cukup informasi atau pendidikan mengenai integritas pajak dan antikorupsi di masyarakat Anda? Apa jenis pendidikan tambahan yang Anda rasa diperlukan?</p>	<p>komunitas.</p> <p>2. Ada beberapa upaya yang dilakukan, namun masih banyak warga yang belum sepenuhnya memahami pentingnya integritas pajak. Pendidikan tambahan tentang cara melaporkan pelanggaran pajak dan korupsi akan sangat membantu.</p>
6.	<p>Saran dan Penutup</p> <p>1. Rekomendasi untuk Pemerintah</p> <p>Berdasarkan pandangan Anda, apa rekomendasi atau saran yang bisa Anda berikan kepada pemerintah untuk mengatasi dampak kasus korupsi dan memperbaiki sistem perpajakan?</p> <p>2. Harapan untuk Masa Depan</p> <p>Apa harapan Anda terkait dengan reformasi perpajakan dan pengelolaan pajak di masa depan setelah terjadinya kasus ini?</p> <p>3. Pernyataan Penutup</p> <p>Apakah ada hal lain yang ingin Anda tambahkan atau sampaikan mengenai dampak kasus korupsi pejabat pajak terhadap kepercayaan masyarakat dan keadilan perpajakan?</p>	<p>1. Implementasi teknologi yang lebih canggih dalam sistem perpajakan dapat membantu mengurangi praktik korupsi. Penggunaan sistem e-filing dan audit berbasis data akan mempersempit celah bagi praktik korupsi.</p> <p>2. Harapan saya adalah bahwa sistem perpajakan di masa depan akan menjadi lebih sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat umum. Dengan reformasi yang jelas, wajib pajak akan lebih mudah memenuhi kewajiban mereka tanpa harus melalui proses yang rumit.</p> <p>3. Kasus korupsi seperti ini seringkali menimbulkan rasa pesimis di kalangan masyarakat tentang keadilan</p>

		<p>perpajakan. Pemerintah harus lebih aktif dalam menunjukkan komitmen mereka terhadap integritas dan transparansi untuk memperbaiki citra tersebut.</p>
--	--	--

I. Identitas Narasumber (4)

- a. Nama : I Gusti Ayu Wika Cynthia Dewi
 b. Umur : 28 Tahun
 c. Jenis Kelamin : Perempuan
 d. Agama : Hindu
 e. Alamat : Banjar Tegalsih
 f. Pekerjaan/Profesi : Bidan

II. Instrumen Wawancara

NO	DIMENSI YANG DI WAWANCARAI	HASIL DOKUMENTASI
1.	<p>Pengantar dan Latar Belakang</p> <p>1. Pengantar Profesi</p> <p>Bisakah Anda menjelaskan jenis usaha atau profesi Anda serta seberapa lama Anda telah terlibat dalam kegiatan perpajakan?</p> <p>2. Pemahaman tentang Kasus</p> <p>Apakah Anda mengetahui tentang kasus korupsi pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo? Jika ya, bagaimana Anda pertama kali mengetahui tentang kasus ini dan apa pemahaman awal Anda tentang</p>	<p>1. Saya adalah seorang pengusaha kecil yang memiliki usaha makanan rumahan dan telah menjalankan usaha ini selama 6 tahun. Saya mematuhi kewajiban perpajakan dengan melaporkan penghasilan usaha saya secara berkala.</p> <p>2. Saya membaca tentang kasus Rafael Alun Trisambodo di media sosial. Dari informasi yang saya lihat, tampaknya ada dugaan suap dan gratifikasi</p>

	<p>situasi tersebut?</p> <p>3. Apakah selama ini penghasilan dilaporkan sesuai dengan aslinya atau tidak?</p>	<p>yang melibatkan pejabat pajak ini, dan hal ini sangat mengkhawatirkan.</p> <p>3. Saya tidak melaporkan penghasilan dengan benar karena tidak ada pencatatan yang jelas.</p>
2.	<p>Dampak Terhadap Kepercayaan Masyarakat</p> <p>1. Persepsi Terhadap Kepercayaan</p> <p>Bagaimana menurut Anda kasus korupsi ini mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap instansi pajak? Apakah Anda merasa kepercayaan masyarakat terhadap pejabat pajak berkurang?</p> <p>2. Pengaruh Terhadap Kepatuhan Pajak</p> <p>Apakah Anda merasa bahwa kasus ini mempengaruhi kepatuhan Anda dan masyarakat lainnya dalam memenuhi kewajiban pajak? Jika ya, dalam hal apa pengaruh tersebut terlihat?</p> <p>3. Reaksi Masyarakat</p> <p>Apa reaksi yang Anda amati dari masyarakat sekitar mengenai kasus korupsi ini? Adakah perubahan signifikan dalam pandangan mereka terhadap sistem</p>	<p>1. Saya percaya bahwa kasus korupsi dapat membuat masyarakat merasa skeptis terhadap integritas pejabat pajak. Kepercayaan terhadap instansi pajak berkurang jika tidak ada tindakan tegas terhadap korupsi.</p> <p>2. Kasus korupsi membuat saya merasa kurang percaya pada sistem pajak, sehingga saya menjadi lebih ragu-ragu dalam memenuhi kewajiban pajak saya. Saya khawatir uang pajak mungkin tidak dikelola dengan baik.</p> <p>3. Reaksi yang saya amati adalah peningkatan skeptisisme terhadap sistem perpajakan. Orang-orang mulai bertanya-tanya apakah pajak yang mereka bayar benar-benar digunakan untuk kepentingan umum.</p>

	perpajakan?	
3.	<p>Keadilan Perpajakan</p> <p>1. Persepsi Keadilan</p> <p>Menurut Anda, bagaimana kasus korupsi ini mempengaruhi persepsi Anda tentang keadilan dalam sistem perpajakan di Indonesia? Apakah Anda merasa ada ketidakadilan yang lebih besar setelah kasus ini terungkap?</p> <p>2. Langkah-Langkah Perbaikan</p> <p>Apa langkah-langkah yang menurut Anda perlu diambil untuk meningkatkan keadilan dalam sistem perpajakan setelah kasus korupsi ini? Adakah reformasi yang Anda harapkan?</p> <p>3. Pengawasan dan Penegakan Hukum</p> <p>Bagaimana Anda menilai efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap pejabat pajak setelah kasus ini? Apakah Anda merasa ada perbaikan dalam hal ini?</p>	<p>1. Saya merasa kasus ini menunjukkan adanya ketidakadilan yang lebih besar. Jika pejabat pajak dapat melakukan korupsi, berarti ada masalah mendasar dalam keadilan sistem perpajakan di Indonesia.</p> <p>2. Penting untuk melakukan audit independen secara berkala terhadap pengelolaan pajak. Selain itu, perlu ada penegakan hukum yang lebih tegas bagi pejabat pajak yang terlibat dalam korupsi.</p> <p>3. Pengawasan dan penegakan hukum menunjukkan adanya beberapa kemajuan, tetapi saya merasa perbaikan yang dilakukan belum memadai. Masih banyak celah yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan penyimpangan</p>
4.	<p>Regulasi dan Kebijakan</p> <p>1. Kebijakan Pemerintah</p> <p>Apakah Anda merasa bahwa kebijakan pemerintah saat ini</p>	<p>1. Kebijakan pemerintah yang ada mungkin belum memadai untuk mencegah korupsi secara menyeluruh. Saya rasa</p>

	<p>cukup efektif untuk mencegah korupsi di kalangan pejabat pajak? Adakah perubahan kebijakan yang Anda rasa diperlukan?</p> <p>2. Dukungan dan Transparansi</p> <p>Apa bentuk dukungan atau transparansi yang menurut Anda perlu ditingkatkan oleh pemerintah untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan?</p>	<p>perlu ada kebijakan yang lebih tegas dalam hal audit dan pengawasan</p> <p>2. Penting untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi tentang kebijakan perpajakan dan proses audit. Pemerintah harus lebih terbuka dalam melaporkan hasil audit dan tindakan yang diambil.</p>
5.	<p>Kesejahteraan Ekonomi dan Komunitas</p> <p>1. Dampak Ekonomi Lokal</p> <p>Menurut Anda, bagaimana dampak kasus korupsi ini terhadap kesejahteraan ekonomi di komunitas Anda? Apakah Anda melihat dampak negatif yang signifikan?</p> <p>2. Pendidikan dan Kesadaran</p> <p>Apakah Anda merasa bahwa ada cukup informasi atau pendidikan mengenai integritas pajak dan antikorupsi di masyarakat Anda? Apa jenis pendidikan tambahan yang Anda rasa diperlukan?</p>	<p>1. Dampak negatif yang saya lihat adalah berkurangnya alokasi dana untuk program-program sosial dan infrastruktur. Korupsi mengarah pada penyelewengan dana yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas.</p> <p>2. Ada beberapa upaya yang dilakukan, namun masih banyak warga yang belum sepenuhnya memahami pentingnya integritas pajak. Pendidikan tambahan tentang cara melaporkan pelanggaran pajak dan korupsi akan sangat membantu.</p>

6.	<p>Saran dan Penutup</p> <p>1. Rekomendasi untuk Pemerintah</p> <p>Berdasarkan pandangan Anda, apa rekomendasi atau saran yang bisa Anda berikan kepada pemerintah untuk mengatasi dampak kasus korupsi dan memperbaiki sistem perpajakan?</p> <p>2. Harapan untuk Masa Depan</p> <p>Apa harapan Anda terkait dengan reformasi perpajakan dan pengelolaan pajak di masa depan setelah terjadinya kasus ini?</p> <p>3. Pernyataan Penutup</p> <p>Apakah ada hal lain yang ingin Anda tambahkan atau sampaikan mengenai dampak kasus korupsi pejabat pajak terhadap kepercayaan masyarakat dan keadilan perpajakan?</p>	<p>1. Implementasi teknologi yang lebih canggih dalam sistem perpajakan dapat membantu mengurangi praktik korupsi. Penggunaan sistem e-filing dan audit berbasis data akan mempersempit celah bagi praktik korupsi.</p> <p>2. Harapan saya adalah bahwa sistem perpajakan di masa depan akan menjadi lebih sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat umum. Dengan reformasi yang jelas, wajib pajak akan lebih mudah memenuhi kewajiban mereka tanpa harus melalui proses yang rumit.</p> <p>3. Kasus korupsi seperti ini seringkali menimbulkan rasa pesimis di kalangan masyarakat tentang keadilan perpajakan. Pemerintah harus lebih aktif dalam menunjukkan komitmen mereka terhadap integritas dan transparansi untuk memperbaiki citra tersebut.</p>
----	--	--

I. Identitas Narasumber (5)

- a. Nama : Ni Luh Wiartini
 b. Umur : 38 Tahun
 c. Jenis Kelamin : Perempuan
 d. Agama : Hindu
 e. Alamat : Banjar Petanahan
 f. Pekerjaan/Profesi : Pengusaha Warung

I. Instrumen Wawancara

NO	DIMENSI YANG DI WAWANCARAI	HASIL DOKUMENTASI
1.	<p>Pengantar dan Latar Belakang</p> <p>1. Pengantar Profesi Bisakah Anda menjelaskan jenis usaha atau profesi Anda serta seberapa lama Anda telah terlibat dalam kegiatan perpajakan?</p> <p>2. Pemahaman tentang Kasus Apakah Anda mengetahui tentang kasus korupsi pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo? Jika ya, bagaimana Anda pertama kali mengetahui tentang kasus ini dan apa pemahaman awal Anda tentang situasi tersebut?</p> <p>3. Apakah selama ini penghasilan dilaporkan sesuai dengan aslinya atau tidak?</p>	<p>1. Saya adalah seorang Pengusaha Warung. Saya memastikan semua penghasilan dari klien dilaporkan dalam SPT tahunan.</p> <p>2. Saya mendengar tentang kasus ini dari program berita radio. Dari informasi awal yang saya terima, Rafael Alun Trisambodo diduga terlibat dalam korupsi yang melibatkan aset dan uang suap, dan itu tentu merusak kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan</p> <p>3. Saya takut jika melaporkan penghasilan asli, karena takut pajak jadi tinggi.</p>
2.	<p>Dampak Terhadap Kepercayaan Masyarakat</p> <p>1. Persepsi Terhadap Kepercayaan</p>	<p>1. Saya rasa masyarakat menjadi lebih waspada dan curiga terhadap pejabat</p>

	<p>Bagaimana menurut Anda kasus korupsi ini mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap instansi pajak? Apakah Anda merasa kepercayaan masyarakat terhadap pejabat pajak berkurang?</p> <p>2. Pengaruh Terhadap Kepatuhan Pajak</p> <p>Apakah Anda merasa bahwa kasus ini mempengaruhi kepatuhan Anda dan masyarakat lainnya dalam memenuhi kewajiban pajak? Jika ya, dalam hal apa pengaruh tersebut terlihat?</p> <p>3. Reaksi Masyarakat</p> <p>Apa reaksi yang Anda amati dari masyarakat sekitar mengenai kasus korupsi ini? Adakah perubahan signifikan dalam pandangan mereka terhadap sistem perpajakan?</p>	<p>pajak setelah mendengar kasus korupsi. Ini membuat kepercayaan mereka terhadap instansi pajak berku</p> <p>2. Ya, ada pengaruhnya. Kepatuhan pajak menurun karena masyarakat merasa bahwa sistem pajak tidak adil dan ada kemungkinan bahwa pajak yang dibayar tidak dikelola dengan baik.</p> <p>3. Reaksi utama dari masyarakat adalah rasa frustrasi. Mereka merasa bahwa kasus korupsi mencerminkan kelemahan dalam sistem perpajakan dan banyak yang meminta reformasi.</p>
3.	<p>Keadilan Perpajakan</p> <p>1. Persepsi Keadilan</p> <p>Menurut Anda, bagaimana kasus korupsi ini mempengaruhi persepsi Anda tentang keadilan dalam sistem perpajakan di Indonesia? Apakah Anda merasa ada ketidakadilan yang lebih besar setelah kasus ini terungkap?</p>	<p>1. Saya merasa ada ketidakadilan yang lebih besar setelah kasus ini. Jika pejabat pajak bisa melakukan korupsi, maka ada kesan bahwa hukum tidak diterapkan secara konsisten.</p> <p>2. Reformasi yang saya harapkan termasuk peningkatan transparansi dalam pengelolaan pajak dan penerapan sistem pelaporan yang lebih ketat untuk</p>

	<p>2. Langkah-Langkah Perbaikan</p> <p>Apa langkah-langkah yang menurut Anda perlu diambil untuk meningkatkan keadilan dalam sistem perpajakan setelah kasus korupsi ini? Adakah reformasi yang Anda harapkan?</p> <p>3. Pengawasan dan Penegakan Hukum</p> <p>Bagaimana Anda menilai efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap pejabat pajak setelah kasus ini? Apakah Anda merasa ada perbaikan dalam hal ini?</p>	<p>mencegah terjadinya korupsi.</p> <p>3. Ada peningkatan dalam pengawasan setelah kasus ini, tetapi saya merasa bahwa penegakan hukum belum cukup tegas. Perlu ada peraturan yang lebih ketat dan penegakan yang lebih konsisten.</p>
4.	<p>Regulasi dan Kebijakan</p> <p>1. Kebijakan Pemerintah</p> <p>Apakah Anda merasa bahwa kebijakan pemerintah saat ini cukup efektif untuk mencegah korupsi di kalangan pejabat pajak? Adakah perubahan kebijakan yang Anda rasa diperlukan?</p> <p>2. Dukungan dan Transparansi</p> <p>Apa bentuk dukungan atau transparansi yang menurut Anda perlu ditingkatkan oleh pemerintah untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem</p>	<p>1. Kebijakan pemerintah saat ini tampaknya kurang efektif. Perlu ada kebijakan yang lebih fokus pada pencegahan, seperti sistem pelaporan anonim dan perlindungan whistleblower yang lebih baik.</p> <p>2. Transparansi dalam pengelolaan pajak harus ditingkatkan dengan mempublikasikan laporan tahunan yang rinci tentang pendapatan dan pengeluaran pajak. Ini akan membantu</p>

	perpajakan?	masyarakat memahami alokasi dan penggunaan dana.
5.	<p>Kesejahteraan Ekonomi dan Komunitas</p> <p>1. Dampak Ekonomi Lokal</p> <p>Menurut Anda, bagaimana dampak kasus korupsi ini terhadap kesejahteraan ekonomi di komunitas Anda? Apakah Anda melihat dampak negatif yang signifikan?</p> <p>2. Pendidikan dan Kesadaran</p> <p>Apakah Anda merasa bahwa ada cukup informasi atau pendidikan mengenai integritas pajak dan antikorupsi di masyarakat Anda? Apa jenis pendidikan tambahan yang Anda rasa diperlukan?</p>	<p>1. Korupsi telah mengakibatkan berkurangnya sumber daya yang tersedia untuk proyek-proyek penting di komunitas kami. Ini menghambat pertumbuhan ekonomi lokal dan memperburuk kondisi sosial-ekonomi masyarakat.</p> <p>2. Sosialisasi tentang pajak dan antikorupsi sudah ada, namun tidak semua orang terjangkau. Pelatihan yang dilakukan di sekolah dan lingkungan kerja dapat memperluas jangkauan edukasi ini.</p>
6.	<p>Saran dan Penutup</p> <p>1. Rekomendasi untuk Pemerintah</p> <p>Berdasarkan pandangan Anda, apa rekomendasi atau saran yang bisa Anda berikan kepada pemerintah untuk mengatasi dampak kasus korupsi dan memperbaiki sistem perpajakan?</p> <p>2. Harapan untuk Masa Depan</p> <p>Apa harapan Anda terkait dengan reformasi perpajakan dan</p>	<p>1. Membangun saluran pengaduan yang aman dan efektif bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan korupsi atau penyalahgunaan wewenang dapat membantu mengatasi masalah ini. Proteksi bagi pelapor juga harus diperkuat.</p> <p>2. Saya berharap reformasi</p>

	<p>pengelolaan pajak di masa depan setelah terjadinya kasus ini?</p> <p>3. Pernyataan Penutup</p> <p>Apakah ada hal lain yang ingin Anda tambahkan atau sampaikan mengenai dampak kasus korupsi pejabat pajak terhadap kepercayaan masyarakat dan keadilan perpajakan?</p>	<p>perpajakan di masa depan akan melibatkan lebih banyak partisipasi publik dalam proses perencanaan dan evaluasi anggaran. Keterlibatan masyarakat dapat memastikan bahwa kebijakan pajak lebih sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka.</p> <p>3. Kasus korupsi ini menggarisbawahi perlunya reformasi sistem pengawasan dan kontrol internal di lembaga perpajakan. Dengan sistem yang lebih baik, kita bisa mencegah terulangnya kasus serupa dan memperbaiki kepercayaan masyarakat.</p>
--	--	--



I. Identitas Narasumber (6)

- a. Nama : I Dewa Ayu Ketut Kariadi
 b. Umur : 49 Tahun
 c. Jenis Kelamin : Perempuan
 d. Agama : Hindu
 e. Alamat : Petanahan
 f. Pekerjaan/Profesi : Guru

II. Instrumen Wawancara

NO	DIMENSI YANG DI WAWANCARAI	HASIL DOKUMENTASI
1.	<p>Pengantar dan Latar Belakang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengantar Profesi Bisakah Anda menjelaskan jenis usaha atau profesi Anda serta seberapa lama Anda telah terlibat dalam kegiatan perpajakan? 2. Pemahaman tentang Kasus Apakah Anda mengetahui tentang kasus korupsi pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo? Jika ya, bagaimana Anda pertama kali mengetahui tentang kasus ini dan apa pemahaman awal Anda tentang situasi tersebut? 3. Apakah selama ini penghasilan dilaporkan sesuai dengan aslinya atau tidak? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Saya seorang petani yang telah menjalankan usaha pertanian selama 8 tahun. Saya aktif dalam melaporkan pendapatan dari hasil pertanian dan memastikan kewajiban pajak saya dipenuhi. 2. Kasus ini pertama kali saya ketahui dari diskusi di forum online. Pemahaman awal saya adalah bahwa Rafael Alun Trisambodo diduga melakukan korupsi dengan memanfaatkan posisi dan wewenangnya untuk keuntungan pribadi. 3. Saya tidak melaporkan penghasilan secara riil hal ini dikarenakan pajak yang dikenakan terlalu tinggi, jadi mereka cenderung menyembunyikan sebagian pendapatan.

2.	<p>Dampak Terhadap Kepercayaan Masyarakat</p> <p>1. Persepsi Terhadap Kepercayaan</p> <p>Bagaimana menurut Anda kasus korupsi ini mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap instansi pajak? Apakah Anda merasa kepercayaan masyarakat terhadap pejabat pajak berkurang?</p> <p>2. Pengaruh Terhadap Kepatuhan Pajak</p> <p>Apakah Anda merasa bahwa kasus ini mempengaruhi kepatuhan Anda dan masyarakat lainnya dalam memenuhi kewajiban pajak? Jika ya, dalam hal apa pengaruh tersebut terlihat?</p> <p>3. Reaksi Masyarakat</p> <p>Apa reaksi yang Anda amati dari masyarakat sekitar mengenai kasus korupsi ini? Adakah perubahan signifikan dalam pandangan mereka terhadap sistem perpajakan?</p>	<p>1. Kasus korupsi mengurangi kepercayaan masyarakat karena mereka merasa bahwa uang pajak yang mereka bayar mungkin tidak digunakan dengan semestinya.</p> <p>2. Kasus korupsi membuat saya lebih enggan untuk membayar pajak secara penuh karena saya tidak yakin uang saya akan digunakan untuk kepentingan umum</p> <p>3. Saya melihat bahwa masyarakat mulai meragukan kemampuan instansi pajak dalam mengelola dana secara efektif. Ada dorongan untuk perubahan yang lebih transparan dan akuntabel.</p>
3.	<p>Keadilan Perpajakan</p> <p>1. Persepsi Keadilan</p> <p>Menurut Anda, bagaimana kasus korupsi ini mempengaruhi persepsi Anda tentang keadilan dalam sistem perpajakan di Indonesia? Apakah Anda merasa ada</p>	<p>1. Kasus korupsi ini mempengaruhi persepsi saya tentang keadilan dalam sistem perpajakan secara signifikan. Saya merasa ada ketidakadilan yang mencolok karena tidak semua orang diperlakukan sama.</p>

	<p>ketidakadilan yang lebih besar setelah kasus ini terungkap?</p> <p>2. Langkah-Langkah Perbaikan</p> <p>Apa langkah-langkah yang menurut Anda perlu diambil untuk meningkatkan keadilan dalam sistem perpajakan setelah kasus korupsi ini? Adakah reformasi yang Anda harapkan?</p> <p>3. Pengawasan dan Penegakan Hukum</p> <p>Bagaimana Anda menilai efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap pejabat pajak setelah kasus ini? Apakah Anda merasa ada perbaikan dalam hal ini?</p>	<p>2. Perlu ada reformasi dalam sistem pengawasan internal dan eksternal. Pembentukan lembaga pengawas independen yang memiliki wewenang untuk menilai dan melaporkan penyimpangan akan sangat membantu.</p> <p>3. Pengawasan terhadap pejabat pajak tampaknya membaik, namun saya masih merasa bahwa penegakan hukum perlu lebih diperkuat. Tindakan hukum yang lebih tegas bisa membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat.</p>
4.	<p>Regulasi dan Kebijakan</p> <p>1. Kebijakan Pemerintah</p> <p>Apakah Anda merasa bahwa kebijakan pemerintah saat ini cukup efektif untuk mencegah korupsi di kalangan pejabat pajak? Adakah perubahan kebijakan yang Anda rasa diperlukan?</p> <p>2. Dukungan dan Transparansi</p> <p>Apa bentuk dukungan atau transparansi yang menurut Anda perlu ditingkatkan oleh pemerintah</p>	<p>1. Saya merasa kebijakan pemerintah belum sepenuhnya memadai untuk mencegah korupsi. Perubahan yang diperlukan adalah meningkatkan pengawasan eksternal dan audit independen terhadap pejabat pajak</p> <p>2. Pemerintah perlu memperbaiki sistem pelaporan dengan membuat data perpajakan yang relevan</p>

	<p>untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan?</p>	<p>lebih mudah diakses oleh publik. Ini termasuk menyediakan laporan tentang penggunaan dana pajak yang jelas dan terperinci.</p>
5.	<p>Kesejahteraan Ekonomi dan Komunitas</p> <p>1. Dampak Ekonomi Lokal</p> <p>Menurut Anda, bagaimana dampak kasus korupsi ini terhadap kesejahteraan ekonomi di komunitas Anda? Apakah Anda melihat dampak negatif yang signifikan?</p> <p>2. Pendidikan dan Kesadaran</p> <p>Apakah Anda merasa bahwa ada cukup informasi atau pendidikan mengenai integritas pajak dan antikorupsi di masyarakat Anda? Apa jenis pendidikan tambahan yang Anda rasa diperlukan?</p>	<p>1. Kasus ini menyebabkan penurunan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan instansi pajak, yang berdampak pada penurunan partisipasi dalam program-program ekonomi dan sosial.</p> <p>2. Kurangnya informasi terkadang menyebabkan kebingungan di kalangan masyarakat. Program edukasi yang terstruktur dan mudah diakses, seperti kampanye media sosial dan workshop interaktif, akan sangat bermanfaat.</p>
6.	<p>Saran dan Penutup</p> <p>1. Rekomendasi untuk Pemerintah</p> <p>Berdasarkan pandangan Anda, apa rekomendasi atau saran yang bisa Anda berikan kepada pemerintah untuk mengatasi dampak kasus korupsi dan memperbaiki sistem perpajakan?</p> <p>2. Harapan untuk Masa Depan</p>	<p>1. Pemerintah harus memperbaiki sistem pengawasan internal dan eksternal untuk memastikan bahwa dana pajak digunakan sesuai dengan peruntukannya. Audit yang independen dan reguler akan meningkatkan akuntabilitas.</p> <p>2. Harapan saya adalah adanya peningkatan penggunaan</p>

	<p>Apa harapan Anda terkait dengan reformasi perpajakan dan pengelolaan pajak di masa depan setelah terjadinya kasus ini?</p> <p>3. Pernyataan Penutup</p> <p>Apakah ada hal lain yang ingin Anda tambahkan atau sampaikan mengenai dampak kasus korupsi pejabat pajak terhadap kepercayaan masyarakat dan keadilan perpajakan?</p>	<p>teknologi dalam sistem perpajakan untuk mempermudah pelaporan dan pembayaran pajak. Sistem digital yang efisien akan mengurangi kemungkinan kesalahan dan korupsi.</p> <p>3. Penting bagi pemerintah untuk memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan sistem perpajakan. Partisipasi publik dalam memantau kebijakan dan pengelolaan pajak akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.</p>
--	---	---



I. Identitas Narasumber (7)

- a. Nama : I Gusti Komang Wiratdika
 b. Umur : 51 Tahun
 c. Jenis Kelamin : Laki-Laki
 d. Agama : Hindu
 e. Alamat : Banjar Petanaha
 f. Pekerjaan/Profesi : Satpam Puskesmas

II. Instrumen Wawancara

NO	DIMENSI YANG DI WAWANCARAI	HASIL DOKUMENTASI
1.	<p>Pengantar dan Latar Belakang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengantar Profesi Bisakah Anda menjelaskan jenis usaha atau profesi Anda serta seberapa lama Anda telah terlibat dalam kegiatan perpajakan? 2. Pemahaman tentang Kasus Apakah Anda mengetahui tentang kasus korupsi pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo? Jika ya, bagaimana Anda pertama kali mengetahui tentang kasus ini dan apa pemahaman awal Anda tentang situasi tersebut? 3. Apakah selama ini penghasilan dilaporkan sesuai dengan aslinya atau tidak? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Saya seorang Satpam Puskesmas. Saya telah memasuki masa pensiun selama 5 tahun dan masih terlibat dalam kegiatan perpajakan untuk melaporkan penghasilan pensiun saya. 2. Saya pertama kali mengetahui kasus ini dari berita di surat kabar. Saya merasa bahwa korupsi yang melibatkan pejabat pajak seperti Rafael Alun Trisambodo bisa berdampak besar pada integritas sistem perpajakan dan kepercayaan masyarakat. 3. Saya sering menyembunyikan pendapatan dari pekerjaan sampingan untuk menghindari pajak.
2.	Dampak Terhadap Kepercayaan Masyarakat	1. Ya, kepercayaan masyarakat pasti menurun.

	<p>1. Persepsi Terhadap Kepercayaan</p> <p>Bagaimana menurut Anda kasus korupsi ini mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap instansi pajak? Apakah Anda merasa kepercayaan masyarakat terhadap pejabat pajak berkurang?</p> <p>2. Pengaruh Terhadap Kepatuhan Pajak</p> <p>Apakah Anda merasa bahwa kasus ini mempengaruhi kepatuhan Anda dan masyarakat lainnya dalam memenuhi kewajiban pajak? Jika ya, dalam hal apa pengaruh tersebut terlihat?</p> <p>3. Reaksi Masyarakat</p> <p>Apa reaksi yang Anda amati dari masyarakat sekitar mengenai kasus korupsi ini? Adakah perubahan signifikan dalam pandangan mereka terhadap sistem perpajakan?</p>	<p>Kasus korupsi menunjukkan bahwa masih ada kelemahan dalam sistem pengawasan dan integritas pejabat pajak.</p> <p>2. Saya rasa kasus ini membuat kepatuhan pajak menurun. Masyarakat menjadi lebih skeptis dan mungkin mencari celah untuk mengurangi jumlah pajak yang dibayar</p> <p>3. Reaksi masyarakat sangat negatif. Banyak yang merasa bahwa pejabat pajak tidak dapat dipercaya dan ini mengarah pada penurunan kepercayaan pada sistem perpajakan secara keseluruhan.</p>
3.	<p>Keadilan Perpajakan</p> <p>1. Persepsi Keadilan</p> <p>Menurut Anda, bagaimana kasus korupsi ini mempengaruhi persepsi Anda tentang keadilan dalam sistem perpajakan di Indonesia? Apakah Anda merasa ada ketidakadilan yang lebih besar setelah kasus ini terungkap?</p>	<p>1. Ada rasa ketidakadilan yang lebih besar setelah kasus ini. Pejabat pajak seharusnya menjadi pihak yang paling adil dalam penerapan pajak, tetapi kasus ini menunjukkan sebaliknya.</p> <p>2. Langkah-langkah seperti meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan</p>

	<p>2. Langkah-Langkah Perbaikan</p> <p>Apa langkah-langkah yang menurut Anda perlu diambil untuk meningkatkan keadilan dalam sistem perpajakan setelah kasus korupsi ini? Adakah reformasi yang Anda harapkan?</p> <p>3. Pengawasan dan Penegakan Hukum</p> <p>Bagaimana Anda menilai efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap pejabat pajak setelah kasus ini? Apakah Anda merasa ada perbaikan dalam hal ini?</p>	<p>perpajakan dan menyediakan platform bagi wajib pajak untuk menyuarakan keluhan mereka dapat meningkatkan keadilan dalam sistem.</p> <p>3. Saya melihat adanya upaya perbaikan dalam pengawasan, tetapi efektivitasnya masih diragukan. Penegakan hukum harus lebih transparan dan adil agar masyarakat merasa yakin bahwa pelanggaran akan dihukum secara memadai.</p>
4.	<p>Regulasi dan Kebijakan</p> <p>1. Kebijakan Pemerintah</p> <p>Apakah Anda merasa bahwa kebijakan pemerintah saat ini cukup efektif untuk mencegah korupsi di kalangan pejabat pajak? Adakah perubahan kebijakan yang Anda rasa diperlukan?</p> <p>2. Dukungan dan Transparansi</p> <p>Apa bentuk dukungan atau transparansi yang menurut Anda perlu ditingkatkan oleh pemerintah untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem</p>	<p>1. Saat ini, kebijakan pemerintah tampaknya tidak cukup kuat untuk mencegah korupsi. Saya berharap ada kebijakan yang lebih keras dan lebih jelas dalam hal sanksi bagi pelanggar</p> <p>2. Dukungan yang perlu ditingkatkan termasuk memperkenalkan kebijakan transparansi yang mewajibkan pejabat pajak untuk melaporkan kekayaan dan sumber pendapatan mereka secara berkala.</p>

	perpajakan?	
5.	<p>Kesejahteraan Ekonomi dan Komunitas</p> <p>1. Dampak Ekonomi Lokal</p> <p>Menurut Anda, bagaimana dampak kasus korupsi ini terhadap kesejahteraan ekonomi di komunitas Anda? Apakah Anda melihat dampak negatif yang signifikan?</p> <p>2. Pendidikan dan Kesadaran</p> <p>Apakah Anda merasa bahwa ada cukup informasi atau pendidikan mengenai integritas pajak dan antikorupsi di masyarakat Anda? Apa jenis pendidikan tambahan yang Anda rasa diperlukan?</p>	<p>1. Dampak negatif yang signifikan adalah meningkatnya biaya hidup akibat penurunan kualitas layanan publik dan infrastruktur. Korupsi mengalihkan dana dari proyek-proyek yang seharusnya meningkatkan kesejahteraan.</p> <p>2. Kami memerlukan lebih banyak materi yang menjelaskan bagaimana korupsi dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari dan dampak positif dari kepatuhan pajak. Penyuluhan yang lebih mendalam mengenai hal ini akan sangat membantu.</p>
6.	<p>Saran dan Penutup</p> <p>1. Rekomendasi untuk Pemerintah</p> <p>Berdasarkan pandangan Anda, apa rekomendasi atau saran yang bisa Anda berikan kepada pemerintah untuk mengatasi dampak kasus korupsi dan memperbaiki sistem perpajakan?</p> <p>2. Harapan untuk Masa Depan</p> <p>Apa harapan Anda terkait dengan reformasi perpajakan dan</p>	<p>1. Memperkuat kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta dalam upaya anti-korupsi sangat penting. Inisiatif bersama untuk mengembangkan standar dan praktik terbaik dapat mengurangi risiko korupsi.</p> <p>2. Saya berharap pemerintah akan melakukan reformasi menyeluruh pada struktur pajak, termasuk penghapusan</p>

	<p>pengelolaan pajak di masa depan setelah terjadinya kasus ini?</p> <p>3. Pernyataan Penutup</p> <p>Apakah ada hal lain yang ingin Anda tambahkan atau sampaikan mengenai dampak kasus korupsi pejabat pajak terhadap kepercayaan masyarakat dan keadilan perpajakan?</p>	<p>pajak yang tidak efektif dan pengenalan kebijakan yang lebih adil dan merata untuk semua wajib pajak.</p> <p>3. Saya ingin menyoroti bahwa dampak psikologis dari kasus korupsi tidak boleh diabaikan. Masyarakat sering merasa frustrasi dan tidak termotivasi untuk membayar pajak jika mereka merasa uang mereka disalahgunakan.</p>
--	--	--



I. Identitas Narasumber (8)

- a. Nama : I Wayan Sumerta
 b. Umur : 54 Tahun
 c. Jenis Kelamin : Laki-Laki
 d. Agama : Hindu
 e. Alamat : Banjar Pancaseming
 f. Pekerjaan/Profesi : Petani

II. Instrumen Wawancara

NO	DIMENSI YANG DI WAWANCARAI	HASIL DOKUMENTASI
1.	<p>Pengantar dan Latar Belakang</p> <p>1. Pengantar Profesi Bisakah Anda menjelaskan jenis usaha atau profesi Anda serta seberapa lama Anda telah terlibat dalam kegiatan perpajakan?</p> <p>2. Pemahaman tentang Kasus Apakah Anda mengetahui tentang kasus korupsi pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo? Jika ya, bagaimana Anda pertama kali mengetahui tentang kasus ini dan apa pemahaman awal Anda tentang situasi tersebut?</p> <p>3. Apakah selama ini penghasilan dilaporkan sesuai dengan aslinya atau tidak?</p>	<p>1. Saya adalah petani. Saya mematuhi kewajiban perpajakan dengan melaporkan pendapatan usaha dan PPN sesuai ketentuan.</p> <p>2. Informasi tentang Rafael Alun Trisambodo saya peroleh dari video berita di internet. Dari berita tersebut, saya memahami bahwa ada dugaan bahwa pejabat pajak ini menerima suap, dan hal ini memperlihatkan perlunya reformasi dalam pengawasan pajak.</p> <p>3. Saya tidak melaporkan seluruh pendapatan secara nyata</p>
2.	<p>Dampak Terhadap Kepercayaan Masyarakat</p> <p>1. Persepsi Kepercayaan Bagaimana menurut Anda kasus korupsi ini mempengaruhi</p>	<p>1. Saya merasa kasus korupsi membuat masyarakat merasa bahwa instansi pajak tidak sepenuhnya bersih. Hal ini membuat</p>

	<p>kepercayaan masyarakat terhadap instansi pajak? Apakah Anda merasa kepercayaan masyarakat terhadap pejabat pajak berkurang?</p> <p>2. Pengaruh Terhadap Kepatuhan Pajak Apakah Anda merasa bahwa kasus ini mempengaruhi kepatuhan Anda dan masyarakat lainnya dalam memenuhi kewajiban pajak? Jika ya, dalam hal apa pengaruh tersebut terlihat?</p> <p>3. Reaksi Masyarakat Apa reaksi yang Anda amati dari masyarakat sekitar mengenai kasus korupsi ini? Adakah perubahan signifikan dalam pandangan mereka terhadap sistem perpajakan?</p>	<p>kepercayaan mereka terhadap pejabat pajak menurun.</p> <p>2. Kasus korupsi mempengaruhi kepatuhan kami. Kami merasa bahwa pajak yang dibayar mungkin tidak dikelola dengan benar, sehingga membuat kami kurang bersemangat untuk mematuhi kewajiban pajak.</p> <p>3. Ada perubahan pandangan yang signifikan. Masyarakat merasa bahwa sistem perpajakan tidak berfungsi dengan baik dan ada kebutuhan mendesak untuk reformasi dalam sistem tersebut.</p>
3.	<p>Keadilan Perpajakan</p> <p>1. Persepsi Keadilan Menurut Anda, bagaimana kasus korupsi ini mempengaruhi persepsi Anda tentang keadilan dalam sistem perpajakan di Indonesia? Apakah Anda merasa ada ketidakadilan yang lebih besar setelah kasus ini terungkap?</p> <p>2. Langkah-Langkah Perbaikan Apa langkah-langkah yang menurut Anda perlu diambil untuk meningkatkan keadilan dalam</p>	<p>1. Kasus ini membuat saya semakin skeptis terhadap keadilan dalam sistem perpajakan. Saya merasa bahwa ketidakadilan lebih nyata dan sistem ini perlu diperbaiki.</p> <p>2. Saya berharap ada kebijakan yang mempermudah akses informasi terkait penggunaan dana pajak. Transparansi dalam laporan keuangan akan membantu masyarakat merasa lebih yakin tentang keadilan</p>

	<p>sistem perpajakan setelah kasus korupsi ini? Adakah reformasi yang Anda harapkan?</p> <p>3. Pengawasan dan Penegakan Hukum</p> <p>Bagaimana Anda menilai efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap pejabat pajak setelah kasus ini? Apakah Anda merasa ada perbaikan dalam hal ini?</p>	<p>sistem perpajakan</p> <p>3. Meskipun ada beberapa perbaikan dalam pengawasan dan penegakan hukum, saya masih merasa bahwa ada ketidakpastian dalam pelaksanaannya. Perbaikan yang ada belum sepenuhnya membangun kepercayaan masyarakat.</p>
4.	<p>Regulasi dan Kebijakan</p> <p>1. Kebijakan Pemerintah</p> <p>Apakah Anda merasa bahwa kebijakan pemerintah saat ini cukup efektif untuk mencegah korupsi di kalangan pejabat pajak? Adakah perubahan kebijakan yang Anda rasa diperlukan?</p> <p>2. Dukungan dan Transparansi</p> <p>Apa bentuk dukungan atau transparansi yang menurut Anda perlu ditingkatkan oleh pemerintah untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan?</p>	<p>1. Kebijakan yang ada saat ini belum sepenuhnya efektif. Perlu adanya reformasi dalam sistem rekrutmen pejabat pajak dan peningkatan pelatihan etika yang lebih mendalam.</p> <p>2. Pemerintah harus memperkuat sistem pelaporan penyimpangan dan korupsi dengan menyediakan perlindungan yang lebih baik bagi whistleblower. Ini akan mendorong lebih banyak laporan mengenai penyimpangan.</p>
5.	<p>Kesejahteraan Ekonomi dan Komunitas</p> <p>1. Dampak Ekonomi Lokal</p> <p>Menurut Anda, bagaimana dampak</p>	<p>1. Saya melihat dampak langsung pada ekonomi komunitas kami, yaitu penurunan pendapatan</p>

	<p>kasus korupsi ini terhadap kesejahteraan ekonomi di komunitas Anda? Apakah Anda melihat dampak negatif yang signifikan?</p> <p>2. Pendidikan dan Kesadaran</p> <p>Apakah Anda merasa bahwa ada cukup informasi atau pendidikan mengenai integritas pajak dan antikorupsi di masyarakat Anda? Apa jenis pendidikan tambahan yang Anda rasa diperlukan?</p>	<p>daerah akibat hilangnya dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan ekonomi lokal</p> <p>2. Saat ini, informasi mengenai integritas pajak dan antikorupsi seringkali hanya disampaikan melalui media massa yang tidak selalu efektif. Pendidikan tambahan dalam bentuk seminar dan kursus yang mudah diikuti bisa meningkatkan kesadaran masyarakat.</p>
6.	<p>Saran dan Penutup</p> <p>1. Rekomendasi untuk Pemerintah</p> <p>Berdasarkan pandangan Anda, apa rekomendasi atau saran yang bisa Anda berikan kepada pemerintah untuk mengatasi dampak kasus korupsi dan memperbaiki sistem perpajakan?</p> <p>2. Harapan untuk Masa Depan</p> <p>Apa harapan Anda terkait dengan reformasi perpajakan dan pengelolaan pajak di masa depan setelah terjadinya kasus ini?</p> <p>3. Pernyataan Penutup</p> <p>Apakah ada hal lain yang ingin Anda tambahkan atau sampaikan</p>	<p>1. Pengembangan aplikasi mobile dan platform digital untuk memudahkan akses informasi pajak dan pelaporan akan mempermudah wajib pajak dan mengurangi kemungkinan praktik korupsi di lapangan.</p> <p>2. Harapan saya adalah adanya peningkatan kualitas layanan pelanggan dari otoritas pajak. Reformasi yang mencakup pelatihan bagi petugas pajak untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan ramah kepada wajib pajak akan sangat membantu.</p> <p>3. Kasus korupsi harus menjadi momentum untuk melakukan</p>

	<p>mengenai dampak kasus korupsi pejabat pajak terhadap kepercayaan masyarakat dan keadilan perpajakan?</p>	<p>evaluasi menyeluruh terhadap sistem perpajakan yang ada. Pemerintah perlu mendengarkan masukan dari masyarakat dan ahli untuk melakukan perbaikan yang signifikan.</p>
--	---	---



I. Identitas Narasumber (9)

- a. Nama : I Ketut Naya
 b. Umur : 44 Tahun
 c. Jenis Kelamin : Laki-laki
 d. Agama : Hindu
 e. Alamat : Banjar Pancaseming
 f. Pekerjaan/Profesi : Satpol PP

II. Instrumen Wawancara

NO	DIMENSI YANG DI WAWANCARAI	HASIL DOKUMENTASI
1.	<p>Pengantar dan Latar Belakang</p> <p>1. Pengantar Profesi Bisakah Anda menjelaskan jenis usaha atau profesi Anda serta seberapa lama Anda telah terlibat dalam kegiatan perpajakan?</p> <p>2. Pemahaman tentang Kasus Apakah Anda mengetahui tentang kasus korupsi pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo? Jika ya, bagaimana Anda pertama kali mengetahui tentang kasus ini dan apa pemahaman awal Anda tentang situasi tersebut?</p> <p>3. Apakah selama ini penghasilan dilaporkan sesuai dengan aslinya atau tidak?</p>	<p>1. Saya seorang Satpol PP. Saya melaporkan penghasilan saya setiap tahun dan mematuhi semua kewajiban perpajakan yang berlaku.</p> <p>2. Saya mengetahui kasus ini melalui aplikasi berita di ponsel saya. Pemahaman awal saya adalah bahwa tindakan korupsi ini memperlihatkan adanya kelemahan dalam sistem perpajakan yang harus segera diperbaiki.</p> <p>3. Saya melaporkan penghasilan lebih rendah karena tidak ingin membayar pajak lebih.</p>
2.	<p>Dampak Terhadap Kepercayaan Masyarakat</p> <p>1. Persepsi Terhadap Kepercayaan Bagaimana menurut Anda kasus</p>	<p>1. Pengaruhnya terlihat dalam peningkatan ketidakpatuhan. Masyarakat merasa bahwa jika pejabat</p>

	<p>korupsi ini mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap instansi pajak? Apakah Anda merasa kepercayaan masyarakat terhadap pejabat pajak berkurang?</p> <p>2. Pengaruh Terhadap Kepatuhan Pajak</p> <p>Apakah Anda merasa bahwa kasus ini mempengaruhi kepatuhan Anda dan masyarakat lainnya dalam memenuhi kewajiban pajak? Jika ya, dalam hal apa pengaruh tersebut terlihat?</p> <p>3. Reaksi Masyarakat</p> <p>Apa reaksi yang Anda amati dari masyarakat sekitar mengenai kasus korupsi ini? Adakah perubahan signifikan dalam pandangan mereka terhadap sistem perpajakan?</p>	<p>pajak tidak jujur, mereka tidak perlu terlalu patuh dalam melaporkan pajak mereka.</p> <p>2. Masyarakat menunjukkan kekhawatiran yang mendalam. Mereka menganggap kasus korupsi ini sebagai indikasi bahwa sistem perpajakan tidak berjalan sebagaimana mestinya dan perlu adanya evaluasi ulang.</p> <p>3. Saya merasa bahwa kasus korupsi ini menunjukkan adanya ketidakadilan yang mendalam dalam sistem perpajakan. Hal ini membuat saya lebih sadar akan ketidakadilan yang mungkin ada dalam sistem.</p>
3.	<p>Keadilan Perpajakan</p> <p>1. Persepsi Keadilan</p> <p>Menurut Anda, bagaimana kasus korupsi ini mempengaruhi persepsi Anda tentang keadilan dalam sistem perpajakan di Indonesia? Apakah Anda merasa ada ketidakadilan yang lebih besar setelah kasus ini terungkap?</p> <p>2. Langkah-Langkah Perbaikan</p>	<p>1. Reformasi yang penting termasuk peninjauan ulang peraturan perpajakan dan penerapan sanksi yang lebih keras terhadap pelanggaran. Ini akan memastikan bahwa semua pihak mematuhi aturan dengan adil.</p> <p>2. Perbaikan dalam pengawasan terlihat, namun penegakan hukum terhadap pejabat pajak masih belum memadai.</p>

	<p>Apa langkah-langkah yang menurut Anda perlu diambil untuk meningkatkan keadilan dalam sistem perpajakan setelah kasus korupsi ini? Adakah reformasi yang Anda harapkan?</p> <p>3. Pengawasan dan Penegakan Hukum</p> <p>Bagaimana Anda menilai efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap pejabat pajak setelah kasus ini? Apakah Anda merasa ada perbaikan dalam hal ini?</p>	<p>Masyarakat berharap agar ada tindakan yang lebih konkret dan konsisten untuk menangani kasus korupsi.</p> <p>3. Saya melihat bahwa kebijakan pemerintah saat ini belum mampu mencegah korupsi dengan efektif. Diperlukan kebijakan yang lebih mendukung transparansi dalam pengelolaan dana pajak</p>
4.	<p>Regulasi dan Kebijakan</p> <p>1. Kebijakan Pemerintah</p> <p>Apakah Anda merasa bahwa kebijakan pemerintah saat ini cukup efektif untuk mencegah korupsi di kalangan pejabat pajak? Adakah perubahan kebijakan yang Anda rasa diperlukan?</p> <p>2. Dukungan dan Transparansi</p> <p>Apa bentuk dukungan atau transparansi yang menurut Anda perlu ditingkatkan oleh pemerintah untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan?</p>	<p>1. Meningkatkan transparansi dalam proses pengadaan dan kontrak yang menggunakan dana pajak sangat penting. Pemerintah harus mempublikasikan detail kontrak dan pengeluaran untuk memastikan akuntabilitas.</p> <p>2. Korupsi mempengaruhi kesejahteraan ekonomi dengan mengurangi efektivitas program-program sosial yang dirancang untuk membantu kelompok-kelompok rentan di komunitas kami.</p>

5.	<p>Kesejahteraan Ekonomi dan Komunitas</p> <p>1. Dampak Ekonomi Lokal</p> <p>Menurut Anda, bagaimana dampak kasus korupsi ini terhadap kesejahteraan ekonomi di komunitas Anda? Apakah Anda melihat dampak negatif yang signifikan?</p> <p>2. Pendidikan dan Kesadaran</p> <p>Apakah Anda merasa bahwa ada cukup informasi atau pendidikan mengenai integritas pajak dan antikorupsi di masyarakat Anda? Apa jenis pendidikan tambahan yang Anda rasa diperlukan?</p>	<p>1. Pendidikan yang ada saat ini cenderung bersifat umum dan tidak spesifik. Saya rasa perlu adanya pelatihan khusus mengenai pengisian dan pelaporan pajak yang transparan serta cara melaporkan praktik korupsi.</p> <p>2. Pemerintah harus memprioritaskan reformasi birokrasi untuk mengurangi kompleksitas sistem perpajakan. Sistem yang lebih sederhana dan efisien akan meminimalkan peluang untuk korupsi dan memudahkan kepatuhan pajak.</p>
6.	<p>Saran dan Penutup</p> <p>1. Rekomendasi untuk Pemerintah</p> <p>Berdasarkan pandangan Anda, apa rekomendasi atau saran yang bisa Anda berikan kepada pemerintah untuk mengatasi dampak kasus korupsi dan memperbaiki sistem perpajakan?</p> <p>2. Harapan untuk Masa Depan</p> <p>Apa harapan Anda terkait dengan reformasi perpajakan dan pengelolaan pajak di masa depan setelah terjadinya kasus ini?</p>	<p>1. Pemerintah harus memprioritaskan reformasi birokrasi untuk mengurangi kompleksitas sistem perpajakan. Sistem yang lebih sederhana dan efisien akan meminimalkan peluang untuk korupsi dan memudahkan kepatuhan pajak.</p> <p>2. Saya ingin melihat adanya kebijakan insentif untuk wajib pajak yang patuh dan proaktif. Reformasi harus mencakup penghargaan atau pengurangan pajak untuk mereka yang</p>

	<p>3. Pernyataan Penutup</p> <p>Apakah ada hal lain yang ingin Anda tambahkan atau sampaikan mengenai dampak kasus korupsi pejabat pajak terhadap kepercayaan masyarakat dan keadilan perpajakan?</p>	<p>berkomitmen pada kepatuhan pajak</p> <p>3. Saya merasa penting untuk mengedukasi masyarakat tentang bagaimana melaporkan ketidakberesan dan korupsi dalam sistem perpajakan. Sistem pengaduan yang efektif dan dilindungi dapat membantu mengungkap dan menangani masalah lebih awal.</p>
--	---	--



I. Identitas Narasumber (10)

- a. Nama : I Gede Suwarjana
 b. Umur : 29 Tahun
 c. Jenis Kelamin : Laki-laki
 d. Agama : Hindu
 e. Alamat : Banjar Taman
 f. Pekerjaan/Profesi : Pegawai Bank

II. Instrumen Wawancara

NO	DIMENSI YANG DI WAWANCARAI	HASIL DOKUMENTASI
1.	<p>Pengantar dan Latar Belakang</p> <p>1. Pengantar Profesi Bisakah Anda menjelaskan jenis usaha atau profesi Anda serta seberapa lama Anda telah terlibat dalam kegiatan perpajakan?</p> <p>2. Pemahaman tentang Kasus Apakah Anda mengetahui tentang kasus korupsi pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo? Jika ya, bagaimana Anda pertama kali mengetahui tentang kasus ini dan apa pemahaman awal Anda tentang situasi tersebut?</p> <p>3. Apakah selama ini penghasilan dilaporkan sesuai dengan aslinya atau tidak?</p>	<p>1. Saya seorang pekerja sosial yang bekerja sebagai Pegawai Bank. Saya terlibat dalam kegiatan perpajakan dengan melaporkan penghasilan saya sebagai wajib pajak pribadi.</p> <p>2. Kasus Rafael Alun Trisambodo pertama kali saya dengar dari berita televisi saat saya sedang makan malam. Saya memahami bahwa ini adalah kasus besar yang menunjukkan betapa seriusnya masalah korupsi di lembaga perpajakan.</p> <p>3. Saya melaporkan pajak dengan sesuai penghasilan saya.</p>
2.	<p>Dampak Terhadap Kepercayaan Masyarakat</p> <p>1. Persepsi Terhadap Kepercayaan</p>	<p>1. Kasus korupsi dapat mengakibatkan penurunan kepercayaan karena</p>

	<p>Bagaimana menurut Anda kasus korupsi ini mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap instansi pajak? Apakah Anda merasa kepercayaan masyarakat terhadap pejabat pajak berkurang?</p> <p>2. Pengaruh Terhadap Kepatuhan Pajak</p> <p>Apakah Anda merasa bahwa kasus ini mempengaruhi kepatuhan Anda dan masyarakat lainnya dalam memenuhi kewajiban pajak? Jika ya, dalam hal apa pengaruh tersebut terlihat?</p> <p>3. Reaksi Masyarakat</p> <p>Apa reaksi yang Anda amati dari masyarakat sekitar mengenai kasus korupsi ini? Adakah perubahan signifikan dalam pandangan mereka terhadap sistem perpajakan?</p>	<p>masyarakat merasa bahwa pajak yang mereka bayar mungkin tidak digunakan secara efisien.</p> <p>2. Ya, saya merasa ada dampaknya. Setelah kasus korupsi, banyak orang yang merasa bahwa membayar pajak tidak ada gunanya jika uang tersebut diselewangkan.</p> <p>3. Reaksi yang terlihat adalah meningkatnya ketidakpercayaan terhadap pejabat pajak. Masyarakat merasa bahwa sistem perpajakan perlu diperbaiki agar lebih transparan dan adil</p>
3.	<p>Keadilan Perpajakan</p> <p>1. Persepsi Keadilan</p> <p>Menurut Anda, bagaimana kasus korupsi ini mempengaruhi persepsi Anda tentang keadilan dalam sistem perpajakan di Indonesia? Apakah Anda merasa ada ketidakadilan yang lebih besar setelah kasus ini terungkap?</p>	<p>1. Kasus ini memperlihatkan bahwa keadilan dalam sistem perpajakan mungkin tidak berlaku untuk semua orang. Ada kesan bahwa ada kelas tertentu yang tidak terpengaruh oleh aturan yang ada.</p> <p>2. Penting untuk melakukan reformasi dalam proses rekrutmen dan penempatan</p>

	<p>2. Langkah-Langkah Perbaikan</p> <p>Apa langkah-langkah yang menurut Anda perlu diambil untuk meningkatkan keadilan dalam sistem perpajakan setelah kasus korupsi ini? Adakah reformasi yang Anda harapkan?</p> <p>3. Pengawasan dan Penegakan Hukum</p> <p>Bagaimana Anda menilai efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap pejabat pajak setelah kasus ini? Apakah Anda merasa ada perbaikan dalam hal ini?</p>	<p>pejabat pajak untuk memastikan bahwa hanya individu yang benar-benar kompeten dan jujur yang menduduki posisi tersebut.</p> <p>3. Pengawasan dan penegakan hukum menunjukkan beberapa kemajuan, tetapi saya merasa bahwa masih banyak yang perlu diperbaiki. Pengawasan harus lebih menyeluruh dan penegakan hukum harus lebih cepat dan tegas.</p>
4.	<p>Regulasi dan Kebijakan</p> <p>1. Kebijakan Pemerintah</p> <p>Apakah Anda merasa bahwa kebijakan pemerintah saat ini cukup efektif untuk mencegah korupsi di kalangan pejabat pajak? Adakah perubahan kebijakan yang Anda rasa diperlukan?</p> <p>2. Dukungan dan Transparansi</p> <p>Apa bentuk dukungan atau transparansi yang menurut Anda perlu ditingkatkan oleh pemerintah untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem</p>	<p>1. Kebijakan pemerintah saat ini perlu diperkuat. Saya rasa perlu adanya perubahan kebijakan yang menekankan pada pemantauan yang lebih ketat dan evaluasi berkala terhadap pejabat pajak.</p> <p>2. Pemerintah perlu meningkatkan transparansi dengan menyediakan informasi tentang kebijakan dan prosedur perpajakan yang jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat</p>

	perpajakan?	umum.
5.	<p>Kesejahteraan Ekonomi dan Komunitas</p> <p>1. Dampak Ekonomi Lokal</p> <p>Menurut Anda, bagaimana dampak kasus korupsi ini terhadap kesejahteraan ekonomi di komunitas Anda? Apakah Anda melihat dampak negatif yang signifikan?</p> <p>2. Pendidikan dan Kesadaran</p> <p>Apakah Anda merasa bahwa ada cukup informasi atau pendidikan mengenai integritas pajak dan antikorupsi di masyarakat Anda? Apa jenis pendidikan tambahan yang Anda rasa diperlukan?</p>	<p>1. Kasus ini menyebabkan penurunan investasi publik di sektor-sektor penting seperti pendidikan dan kesehatan, yang berdampak negatif pada kesejahteraan ekonomi masyarakat</p> <p>2. Walaupun ada beberapa program edukasi, mereka belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Inisiatif edukasi yang melibatkan tokoh masyarakat dan pemimpin lokal bisa lebih efektif dalam menyebarkan informasi ini.</p>
6.	<p>Saran dan Penutup</p> <p>1. Rekomendasi untuk Pemerintah</p> <p>Berdasarkan pandangan Anda, apa rekomendasi atau saran yang bisa Anda berikan kepada pemerintah untuk mengatasi dampak kasus korupsi dan memperbaiki sistem perpajakan?</p> <p>2. Harapan untuk Masa Depan</p> <p>Apa harapan Anda terkait dengan reformasi perpajakan dan pengelolaan pajak di masa depan</p>	<p>1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan anggaran dan pajak dapat membantu mengurangi korupsi. Keterlibatan publik dalam perencanaan dan evaluasi program akan meningkatkan transparansi.</p> <p>2. Harapan saya adalah adanya penekanan yang lebih besar pada pendidikan dan sosialisasi mengenai kewajiban pajak dan etika</p>

	<p>setelah terjadinya kasus ini?</p> <p>3. Pernyataan Penutup</p> <p>Apakah ada hal lain yang ingin Anda tambahkan atau sampaikan mengenai dampak kasus korupsi pejabat pajak terhadap kepercayaan masyarakat dan keadilan perpajakan?</p>	<p>perpajakan. Masyarakat yang teredukasi dengan baik akan lebih memahami pentingnya kepatuhan pajak dan dampak dari korupsi.</p> <p>3. Perlu ada langkah-langkah konkret untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat, seperti transparansi dalam pengelolaan dana dan laporan berkala tentang perbaikan yang telah dilakukan untuk mencegah korupsi di masa depan.</p>
--	--	--



I. Identitas Narasumber (11)

- a. Nama : Ni Kadek Sintia Puspa Yanti
 b. Umur : 35 Tahun
 c. Jenis Kelamin : Perempuan
 d. Agama : Hindu
 e. Alamat : Banjar Taman
 f. Pekerjaan/Profesi : Perawat

II. Instrumen Wawancara

NO	DIMENSI YANG DI WAWANCARAI	HASIL DOKUMENTASI
1.	<p>Pengantar dan Latar Belakang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengantar Profesi Bisakah Anda menjelaskan jenis usaha atau profesi Anda serta seberapa lama Anda telah terlibat dalam kegiatan perpajakan? 2. Pemahaman tentang Kasus Apakah Anda mengetahui tentang kasus korupsi pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo? Jika ya, bagaimana Anda pertama kali mengetahui tentang kasus ini dan apa pemahaman awal Anda tentang situasi tersebut? 3. Apakah selama ini penghasilan dilaporkan sesuai dengan aslinya atau tidak? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Saya seorang perawat. Saya melaporkan semua penghasilan dari jasa yang saya berikan sesuai dengan ketentuan perpajakan. 2. Saya pertama kali mengetahui kasus ini dari podcast berita. Saya merasa bahwa kasus Rafael Alun Trisambodo mencerminkan masalah yang lebih luas dalam pengawasan pejabat publik dan transparansi. 3. Saya selalu berusaha melaporkan semua penghasilan karena ingin tetap patuh terhadap hukum dan menghindari masalah di masa depan.
2.	<p>Dampak Terhadap Kepercayaan Masyarakat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persepsi Terhadap Kepercayaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Saya rasa kepercayaan masyarakat terhadap pejabat pajak berkurang

	<p>Bagaimana menurut Anda kasus korupsi ini mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap instansi pajak? Apakah Anda merasa kepercayaan masyarakat terhadap pejabat pajak berkurang?</p> <p>2. Pengaruh Terhadap Kepatuhan Pajak</p> <p>Apakah Anda merasa bahwa kasus ini mempengaruhi kepatuhan Anda dan masyarakat lainnya dalam memenuhi kewajiban pajak? Jika ya, dalam hal apa pengaruh tersebut terlihat?</p> <p>3. Reaksi Masyarakat</p> <p>Apa reaksi yang Anda amati dari masyarakat sekitar mengenai kasus korupsi ini? Adakah perubahan signifikan dalam pandangan mereka terhadap sistem perpajakan?</p>	<p>akibat kasus korupsi. Hal ini karena masyarakat merasa ada potensi penyimpangan dalam pengelolaan pajak.</p> <p>2. Kasus ini membuat saya merasa kurang percaya pada sistem pajak dan mengakibatkan penurunan kepatuhan. Saya khawatir bahwa uang pajak saya tidak digunakan dengan benar.</p> <p>3. Saya amati bahwa masyarakat menjadi lebih kritis terhadap sistem perpajakan. Banyak yang menuntut agar ada tindakan tegas dan perubahan dalam sistem untuk menghindari kasus serupa di masa depan.</p>
3.	<p>Keadilan Perpajakan</p> <p>1. Persepsi Keadilan</p> <p>Menurut Anda, bagaimana kasus korupsi ini mempengaruhi persepsi Anda tentang keadilan dalam sistem perpajakan di Indonesia? Apakah Anda merasa ada ketidakadilan yang lebih besar setelah kasus ini terungkap?</p>	<p>1. Setelah kasus korupsi ini, saya merasa bahwa ketidakadilan dalam sistem perpajakan semakin jelas. Pejabat pajak yang terlibat membuat saya merasa bahwa sistem ini tidak adil bagi wajib pajak biasa.</p> <p>2. Saya percaya bahwa sistem pengaduan dan perlindungan whistleblower harus diperkuat. Wajib pajak harus memiliki</p>

	<p>2. Langkah-Langkah Perbaikan</p> <p>Apa langkah-langkah yang menurut Anda perlu diambil untuk meningkatkan keadilan dalam sistem perpajakan setelah kasus korupsi ini? Adakah reformasi yang Anda harapkan?</p> <p>3. Pengawasan dan Penegakan Hukum</p> <p>Bagaimana Anda menilai efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap pejabat pajak setelah kasus ini? Apakah Anda merasa ada perbaikan dalam hal ini?</p>	<p>saluran yang jelas untuk melaporkan penyimpangan tanpa takut akan pembalasan.</p> <p>3. Ada indikasi perbaikan dalam pengawasan, tetapi penegakan hukum masih kurang efektif. Tindakan tegas dan transparansi dalam penegakan hukum sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kepercayaan publik.</p>
4.	<p>Regulasi dan Kebijakan</p> <p>1. Kebijakan Pemerintah</p> <p>Apakah Anda merasa bahwa kebijakan pemerintah saat ini cukup efektif untuk mencegah korupsi di kalangan pejabat pajak? Adakah perubahan kebijakan yang Anda rasa diperlukan?</p> <p>2. Dukungan dan Transparansi</p> <p>Apa bentuk dukungan atau transparansi yang menurut Anda perlu ditingkatkan oleh pemerintah untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem</p>	<p>1. Kebijakan yang ada saat ini tampaknya belum cukup untuk mengatasi korupsi. Saya berharap ada kebijakan yang lebih ketat dalam hal pelaporan dan transparansi terkait aktivitas pejabat pajak.</p> <p>2. Dukungan yang diperlukan termasuk memperkenalkan sistem audit independen yang lebih ketat dan transparan. Laporan audit harus dipublikasikan dan ditindaklanjuti dengan</p>

	perpajakan?	tindakan yang jelas.
5.	<p>Kesejahteraan Ekonomi dan Komunitas</p> <p>1. Dampak Ekonomi Lokal</p> <p>Menurut Anda, bagaimana dampak kasus korupsi ini terhadap kesejahteraan ekonomi di komunitas Anda? Apakah Anda melihat dampak negatif yang signifikan?</p> <p>2. Pendidikan dan Kesadaran</p> <p>Apakah Anda merasa bahwa ada cukup informasi atau pendidikan mengenai integritas pajak dan antikorupsi di masyarakat Anda? Apa jenis pendidikan tambahan yang Anda rasa diperlukan?</p>	<p>1. Dampak negatif yang saya rasakan adalah terhambatnya pembangunan infrastruktur yang krusial. Dana yang seharusnya digunakan untuk proyek-proyek infrastruktur seringkali diselewengkan, menghambat pertumbuhan ekonomi.</p> <p>2. Kami membutuhkan materi pendidikan yang lebih relevan dan mudah dipahami oleh semua kalangan, termasuk mereka yang tidak memiliki latar belakang ekonomi atau hukum. Program-program yang berbasis pada kehidupan sehari-hari akan lebih efektif.</p>
6.	<p>Saran dan Penutup</p> <p>1. Rekomendasi untuk Pemerintah</p> <p>Berdasarkan pandangan Anda, apa rekomendasi atau saran yang bisa Anda berikan kepada pemerintah untuk mengatasi dampak kasus korupsi dan memperbaiki sistem perpajakan?</p> <p>2. Harapan untuk Masa Depan</p> <p>Apa harapan Anda terkait dengan reformasi perpajakan dan</p>	<p>1. Pemerintah perlu meningkatkan kerjasama dengan lembaga internasional untuk mendapatkan bantuan teknis dan pengalaman dalam memperbaiki sistem perpajakan dan mengatasi korupsi.</p> <p>2. Saya berharap reformasi perpajakan akan mencakup penguatan lembaga pengawasan independen yang</p>

	<p>pengelolaan pajak di masa depan setelah terjadinya kasus ini?</p> <p>3. Pernyataan Penutup</p> <p>Apakah ada hal lain yang ingin Anda tambahkan atau sampaikan mengenai dampak kasus korupsi pejabat pajak terhadap kepercayaan masyarakat dan keadilan perpajakan?</p>	<p>dapat memantau dan melaporkan pelanggaran serta penyalahgunaan dalam pengelolaan pajak secara objektif dan tanpa campur tangan.</p> <p>3. Saya ingin menekankan pentingnya perlindungan terhadap whistleblower yang melaporkan kasus korupsi. Tanpa perlindungan yang memadai, masyarakat mungkin enggan untuk melaporkan pelanggaran yang mereka ketahui.</p>
--	--	---



I. Identitas Narasumber (12)

- a. Nama : I Nengah Sudendra
 b. Umur : 58 Tahun
 c. Jenis Kelamin : Laki-laki
 d. Agama : Hindu
 e. Alamat : Banjar Palunganbatu
 f. Pekerjaan/Profesi : Penjual Sayuran

II. Instrumen Wawancara

NO	DIMENSI YANG DI WAWANCARAI	HASIL DOKUMENTASI
1.	<p>Pengantar dan Latar Belakang</p> <p>1. Pengantar Profesi Bisakah Anda menjelaskan jenis usaha atau profesi Anda serta seberapa lama Anda telah terlibat dalam kegiatan perpajakan?</p> <p>2. Pemahaman tentang Kasus Apakah Anda mengetahui tentang kasus korupsi pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo? Jika ya, bagaimana Anda pertama kali mengetahui tentang kasus ini dan apa pemahaman awal Anda tentang situasi tersebut?</p> <p>3. Apakah selama ini penghasilan dilaporkan sesuai dengan aslinya atau tidak?</p>	<p>1. Saya seorang Penjual Sayuran. Saya terlibat dalam kegiatan perpajakan dengan melaporkan penghasilan dari hasil-hasil jualan sayur.</p> <p>2. Saya mendapatkan informasi tentang Rafael Alun Trisambodo dari grup diskusi di media sosial. Dari yang saya baca, ada indikasi bahwa pejabat ini terlibat dalam suap dan gratifikasi, yang jelas merugikan banyak pihak.</p> <p>3. Keluarga saya selalu menekankan pentingnya kejujuran dalam melaporkan penghasilan, jadi saya merasa tidak ada alasan untuk menyembunyikan apapun.</p>
2.	<p>Dampak Terhadap Kepercayaan Masyarakat</p> <p>1. Persepsi Terhadap Kepercayaan</p>	<p>1. Kasus korupsi memberi dampak negatif pada citra instansi pajak. Masyarakat</p>

	<p>Bagaimana menurut Anda kasus korupsi ini mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap instansi pajak? Apakah Anda merasa kepercayaan masyarakat terhadap pejabat pajak berkurang?</p> <p>2. Pengaruh Terhadap Kepatuhan Pajak</p> <p>Apakah Anda merasa bahwa kasus ini mempengaruhi kepatuhan Anda dan masyarakat lainnya dalam memenuhi kewajiban pajak? Jika ya, dalam hal apa pengaruh tersebut terlihat?</p> <p>3. Reaksi Masyarakat</p> <p>Apa reaksi yang Anda amati dari masyarakat sekitar mengenai kasus korupsi ini? Adakah perubahan signifikan dalam pandangan mereka terhadap sistem perpajakan?</p>	<p>jadi ragu apakah pejabat pajak benar-benar menjalankan tugas mereka dengan jujur.</p> <p>2. Kepatuhan pajak masyarakat menurun karena ada ketidakpastian mengenai penggunaan dana pajak. Ini membuat orang lebih cenderung menghindari kewajiban pajak.</p> <p>3. Setelah kasus korupsi, masyarakat mulai mempertanyakan efektivitas sistem perpajakan. Ada rasa frustrasi yang meluas karena merasa sistem ini tidak cukup transparan dan akuntabel.</p>
3.	<p>Keadilan Perpajakan</p> <p>1. Persepsi Keadilan</p> <p>Menurut Anda, bagaimana kasus korupsi ini mempengaruhi persepsi Anda tentang keadilan dalam sistem perpajakan di Indonesia? Apakah Anda merasa ada ketidakadilan yang lebih besar setelah kasus ini terungkap?</p> <p>2. Langkah-Langkah Perbaikan</p> <p>Apa langkah-langkah yang menurut</p>	<p>1. Kasus ini memperburuk persepsi saya tentang keadilan dalam sistem perpajakan. Saya merasa ada ketidakadilan yang lebih besar karena pejabat pajak yang seharusnya menegakkan keadilan justru terlibat dalam pelanggaran.</p> <p>2. Reformasi dalam sistem pelaporan dan pemantauan transaksi pajak harus dilakukan. Teknologi baru seperti blockchain bisa</p>

	<p>Anda perlu diambil untuk meningkatkan keadilan dalam sistem perpajakan setelah kasus korupsi ini? Adakah reformasi yang Anda harapkan?</p> <p>3. Pengawasan dan Penegakan Hukum</p> <p>Bagaimana Anda menilai efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap pejabat pajak setelah kasus ini? Apakah Anda merasa ada perbaikan dalam hal ini?</p>	<p>digunakan untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi potensi korupsi.</p> <p>3. Saya merasa bahwa efektivitas pengawasan dan penegakan hukum meningkat sedikit, namun masih ada banyak pekerjaan rumah. Pengawasan harus lebih terstruktur dan penegakan hukum harus lebih berani dalam menghadapi kasus-kasus besar.</p>
4.	<p>Regulasi dan Kebijakan</p> <p>1. Kebijakan Pemerintah</p> <p>Apakah Anda merasa bahwa kebijakan pemerintah saat ini cukup efektif untuk mencegah korupsi di kalangan pejabat pajak? Adakah perubahan kebijakan yang Anda rasa diperlukan?</p> <p>2. Dukungan dan Transparansi</p> <p>Apa bentuk dukungan atau transparansi yang menurut Anda perlu ditingkatkan oleh pemerintah untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan?</p>	<p>1. Saya merasa kebijakan pemerintah belum memadai. Diperlukan perubahan kebijakan yang mencakup pembentukan lembaga pengawasan independen dan peningkatan standar etika bagi pejabat pajak.</p> <p>2. Pemerintah harus lebih proaktif dalam menyediakan informasi tentang langkah-langkah yang diambil untuk mencegah korupsi dan meningkatkan akuntabilitas pejabat pajak.</p>
5.	Kesejahteraan Ekonomi dan Komunitas	1. Korupsi menurunkan

	<p>1. Dampak Ekonomi Lokal</p> <p>Menurut Anda, bagaimana dampak kasus korupsi ini terhadap kesejahteraan ekonomi di komunitas Anda? Apakah Anda melihat dampak negatif yang signifikan?</p> <p>2. Pendidikan dan Kesadaran</p> <p>Apakah Anda merasa bahwa ada cukup informasi atau pendidikan mengenai integritas pajak dan antikorupsi di masyarakat Anda? Apa jenis pendidikan tambahan yang Anda rasa diperlukan?</p>	<p>kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, yang mengarah pada penurunan partisipasi dalam kegiatan ekonomi. Ini mempengaruhi stabilitas ekonomi di komunitas kami.</p> <p>2. Sosialisasi mengenai integritas pajak seringkali tidak menyentuh aspek praktis. Pendidikan tambahan yang berfokus pada aplikasi nyata dan penguatan praktik sehari-hari akan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan.</p>
6.	<p>Saran dan Penutup</p> <p>1. Rekomendasi untuk Pemerintah</p> <p>Berdasarkan pandangan Anda, apa rekomendasi atau saran yang bisa Anda berikan kepada pemerintah untuk mengatasi dampak kasus korupsi dan memperbaiki sistem perpajakan?</p> <p>2. Harapan untuk Masa Depan</p> <p>Apa harapan Anda terkait dengan reformasi perpajakan dan pengelolaan pajak di masa depan setelah terjadinya kasus ini?</p> <p>3. Pernyataan Penutup</p>	<p>1. Membuat kebijakan insentif untuk wajib pajak yang patuh dan melaporkan pelanggaran pajak secara sukarela dapat mendorong lebih banyak partisipasi dalam sistem perpajakan yang bersih</p> <p>2. Harapan saya adalah bahwa pemerintah akan mengimplementasikan sistem pelaporan yang lebih transparan, sehingga setiap transaksi dan penggunaan dana pajak dapat dipantau secara terbuka oleh publik.</p> <p>3. Kasus korupsi ini</p>

	<p>Apakah ada hal lain yang ingin Anda tambahkan atau sampaikan mengenai dampak kasus korupsi pejabat pajak terhadap kepercayaan masyarakat dan keadilan perpajakan?</p>	<p>menunjukkan perlunya pembaruan dan pemutakhiran regulasi yang mengatur kode etik pejabat pajak. Kebijakan yang lebih ketat dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang di masa mendatang.</p>
--	--	--



I. Identitas Narasumber (13)

- a. Nama : Ida Kade Rama
 b. Umur : 75 Tahun
 c. Jenis Kelamin : Laki-laki
 d. Agama : Hindu
 e. Alamat : Banjar Palunganbatu
 f. Pekerjaan/Profesi : Pensiunan Guru

III. Instrumen Wawancara

NO	DIMENSI YANG DI WAWANCARAI	HASIL DOKUMENTASI
1.	<p>Pengantar dan Latar Belakang</p> <p>1. Pengantar Profesi Bisakah Anda menjelaskan jenis usaha atau profesi Anda serta seberapa lama Anda telah terlibat dalam kegiatan perpajakan?</p> <p>2. Pemahaman tentang Kasus Apakah Anda mengetahui tentang kasus korupsi pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo? Jika ya, bagaimana Anda pertama kali mengetahui tentang kasus ini dan apa pemahaman awal Anda tentang situasi tersebut?</p> <p>3. Apakah selama ini penghasilan dilaporkan sesuai dengan aslinya atau tidak?</p>	<p>1. Saya seorang Pensiunan Guru. Saya mematuhi kewajiban perpajakan dengan melaporkan pendapatan usaha dan mematuhi aturan yang berlaku.</p> <p>2. Berita tentang kasus ini pertama kali saya lihat di halaman berita di media cetak. Saya memahami bahwa ini adalah kasus korupsi yang melibatkan pejabat pajak tinggi, dan ini menambah keprihatinan saya tentang integritas lembaga pemerintah.</p> <p>3. Dengan melaporkan penghasilan secara akurat, saya bisa mendapatkan keuntungan dari program-program pemerintah dan layanan publik yang didanai oleh pajak.</p>
2.	Dampak Terhadap Kepercayaan	1. Kepercayaan masyarakat

	<p>Masyarakat</p> <p>1. Persepsi Terhadap Kepercayaan</p> <p>Bagaimana menurut Anda kasus korupsi ini mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap instansi pajak? Apakah Anda merasa kepercayaan masyarakat terhadap pejabat pajak berkurang?</p> <p>2. Pengaruh Terhadap Kepatuhan Pajak</p> <p>Apakah Anda merasa bahwa kasus ini mempengaruhi kepatuhan Anda dan masyarakat lainnya dalam memenuhi kewajiban pajak? Jika ya, dalam hal apa pengaruh tersebut terlihat?</p> <p>3. Reaksi Masyarakat</p> <p>Apa reaksi yang Anda amati dari masyarakat sekitar mengenai kasus korupsi ini? Adakah perubahan signifikan dalam pandangan mereka terhadap sistem perpajakan?</p>	<p>terhadap instansi pajak bisa menurun karena kasus korupsi menunjukkan adanya kemungkinan penyelewengan dalam proses administrasi pajak.</p> <p>2. Kasus korupsi menyebabkan saya merasa bahwa pajak mungkin tidak digunakan secara efektif, sehingga kepatuhan saya terhadap kewajiban pajak menjadi berkurang</p> <p>3. Reaksi masyarakat adalah peningkatan rasa curiga. Mereka merasa bahwa kasus korupsi menunjukkan adanya masalah mendalam dalam sistem perpajakan yang perlu diperbaiki</p>
3.	<p>Keadilan Perpajakan</p> <p>1. Persepsi Keadilan</p> <p>Menurut Anda, bagaimana kasus korupsi ini mempengaruhi persepsi Anda tentang keadilan dalam sistem perpajakan di Indonesia? Apakah Anda merasa ada ketidakadilan yang lebih besar</p>	<p>1. Saya melihat adanya ketidakadilan yang lebih besar setelah kasus ini. Masyarakat mulai meragukan apakah sistem perpajakan benar-benar adil bagi semua pihak.</p> <p>2. Perlu ada reformasi dalam kebijakan insentif bagi pejabat pajak. Insentif yang diberikan</p>

	<p>setelah kasus ini terungkap?</p> <p>2. Langkah-Langkah Perbaikan</p> <p>Apa langkah-langkah yang menurut Anda perlu diambil untuk meningkatkan keadilan dalam sistem perpajakan setelah kasus korupsi ini? Adakah reformasi yang Anda harapkan?</p> <p>3. Pengawasan dan Penegakan Hukum</p> <p>Bagaimana Anda menilai efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap pejabat pajak setelah kasus ini? Apakah Anda merasa ada perbaikan dalam hal ini?</p>	<p>harus didasarkan pada kinerja dan integritas, bukan hanya pada target penerimaan pajak.</p> <p>3. Perbaikan dalam pengawasan terlihat, namun saya merasa bahwa penegakan hukum belum sepenuhnya memadai. Perlu ada tindakan yang lebih tegas dan berkelanjutan untuk menangani masalah korupsi.</p>
4.	<p>Regulasi dan Kebijakan</p> <p>1. Kebijakan Pemerintah</p> <p>Apakah Anda merasa bahwa kebijakan pemerintah saat ini cukup efektif untuk mencegah korupsi di kalangan pejabat pajak? Adakah perubahan kebijakan yang Anda rasa diperlukan?</p> <p>2. Dukungan dan Transparansi</p> <p>Apa bentuk dukungan atau transparansi yang menurut Anda perlu ditingkatkan oleh pemerintah untuk memulihkan kepercayaan</p>	<p>1. Kebijakan saat ini tampaknya belum efektif dalam mencegah korupsi. Perubahan yang diperlukan adalah memperkuat mekanisme kontrol internal dan audit yang lebih ketat untuk pejabat pajak.</p> <p>2. Meningkatkan transparansi dengan melakukan audit publik secara reguler tentang pengelolaan dana pajak dan hasilnya sangat penting untuk memulihkan kepercayaan</p>

	masyarakat terhadap sistem perpajakan?	masyarakat.
5.	<p>Kesejahteraan Ekonomi dan Komunitas</p> <p>1. Dampak Ekonomi Lokal</p> <p>Menurut Anda, bagaimana dampak kasus korupsi ini terhadap kesejahteraan ekonomi di komunitas Anda? Apakah Anda melihat dampak negatif yang signifikan?</p> <p>2. Pendidikan dan Kesadaran</p> <p>Apakah Anda merasa bahwa ada cukup informasi atau pendidikan mengenai integritas pajak dan antikorupsi di masyarakat Anda? Apa jenis pendidikan tambahan yang Anda rasa diperlukan?</p>	<p>1. Kasus ini telah menyebabkan penurunan kualitas layanan publik, seperti kesehatan dan pendidikan, yang berdampak langsung pada kesejahteraan ekonomi komunitas kami.</p> <p>2. Ada kekurangan dalam hal penerjemahan informasi ke dalam bahasa dan format yang mudah dimengerti oleh masyarakat umum. Pendidikan tambahan yang melibatkan visual dan alat bantu lain bisa membantu menjelaskan konsep-konsep ini dengan lebih baik.</p>
6.	<p>Saran dan Penutup</p> <p>1. Rekomendasi untuk Pemerintah</p> <p>Berdasarkan pandangan Anda, apa rekomendasi atau saran yang bisa Anda berikan kepada pemerintah untuk mengatasi dampak kasus korupsi dan memperbaiki sistem perpajakan?</p> <p>2. Harapan untuk Masa Depan</p> <p>Apa harapan Anda terkait dengan reformasi perpajakan dan pengelolaan pajak di masa depan</p>	<p>1. Menerapkan sistem verifikasi dan validasi data yang lebih ketat dalam pengumpulan pajak dapat mengurangi kesalahan dan manipulasi. Teknologi analisis data dan kecerdasan buatan dapat digunakan untuk tujuan ini.</p> <p>2. Saya ingin melihat reformasi yang memperbaiki proses pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk memastikan bahwa semua transaksi</p>

	<p>setelah terjadinya kasus ini?</p> <p>3. Pernyataan Penutup</p> <p>Apakah ada hal lain yang ingin Anda tambahkan atau sampaikan mengenai dampak kasus korupsi pejabat pajak terhadap kepercayaan masyarakat dan keadilan perpajakan?</p>	<p>dilakukan secara adil dan sesuai prosedur, sehingga mengurangi risiko korupsi dalam pengelolaan anggaran.</p> <p>3. Saya berharap pemerintah akan lebih proaktif dalam membangun kembali citra mereka di mata masyarakat melalui inisiatif yang menunjukkan komitmen nyata terhadap reformasi dan integritas.</p>
--	--	--



I. Identitas Narasumber (14)

- a. Nama : I Putu Agus Pranata
 b. Umur : 30 Tahun
 c. Jenis Kelamin : Perempuan
 d. Agama : Hindu
 e. Alamat : Banjar Sawe
 f. Pekerjaan/Profesi : Pegawai PLN

II. Instrumen Wawancara

NO	DIMENSI YANG DI WAWANCARAI	HASIL DOKUMENTASI
1.	<p>Pengantar dan Latar Belakang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengantar Profesi Bisakah Anda menjelaskan jenis usaha atau profesi Anda serta seberapa lama Anda telah terlibat dalam kegiatan perpajakan? 2. Pemahaman tentang Kasus Apakah Anda mengetahui tentang kasus korupsi pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo? Jika ya, bagaimana Anda pertama kali mengetahui tentang kasus ini dan apa pemahaman awal Anda tentang situasi tersebut? 3. Apakah selama ini penghasilan dilaporkan sesuai dengan aslinya atau tidak? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Saya seorang Pegawai PLN. Saya melaporkan semua pendapatan dari penjualan buku dan royalti sesuai dengan ketentuan perpajakan. 2. Saya mengetahui kasus Rafael Alun Trisambodo melalui berita yang dibagikan oleh teman di aplikasi chat. Dari berita yang saya baca, kasus ini tampaknya melibatkan suap dan korupsi yang mempengaruhi banyak aspek perpajakan. 3. Saya percaya bahwa transparansi dalam pelaporan keuangan sangat penting untuk membangun reputasi yang baik dalam bisnis.
2.	<p>Dampak Terhadap Kepercayaan Masyarakat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persepsi Terhadap Kepercayaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setelah kasus korupsi, masyarakat bisa merasa bahwa ada ketidakadilan

	<p>Bagaimana menurut Anda kasus korupsi ini mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap instansi pajak? Apakah Anda merasa kepercayaan masyarakat terhadap pejabat pajak berkurang?</p> <p>2. Pengaruh Terhadap Kepatuhan Pajak</p> <p>Apakah Anda merasa bahwa kasus ini mempengaruhi kepatuhan Anda dan masyarakat lainnya dalam memenuhi kewajiban pajak? Jika ya, dalam hal apa pengaruh tersebut terlihat?</p> <p>3. Reaksi Masyarakat</p> <p>Apa reaksi yang Anda amati dari masyarakat sekitar mengenai kasus korupsi ini? Adakah perubahan signifikan dalam pandangan mereka terhadap sistem perpajakan?</p>	<p>dalam pengelolaan pajak. Ini tentu mempengaruhi tingkat kepercayaan mereka terhadap pejabat pajak</p> <p>2. Masyarakat mungkin merasa bahwa jika pejabat pajak tidak jujur, tidak ada manfaat nyata dalam memenuhi kewajiban pajak secara penuh, yang mengakibatkan penurunan kepatuhan.</p> <p>3. Masyarakat menjadi lebih skeptis dan meminta reformasi. Mereka merasa bahwa sistem perpajakan perlu mengalami perbaikan besar agar dapat dipercaya kembali.</p>
3.	<p>Keadilan Perpajakan</p> <p>1. Persepsi Keadilan</p> <p>Menurut Anda, bagaimana kasus korupsi ini mempengaruhi persepsi Anda tentang keadilan dalam sistem perpajakan di Indonesia? Apakah Anda merasa ada ketidakadilan yang lebih besar setelah kasus ini terungkap?</p> <p>2. Langkah-Langkah Perbaikan</p> <p>Apa langkah-langkah yang menurut</p>	<p>1. Kasus korupsi ini menunjukkan bahwa sistem perpajakan tidak sepenuhnya adil. Saya merasa ada ketidakadilan yang lebih mendalam karena pejabat pajak sendiri terlibat dalam penyalahgunaan.</p> <p>2. Langkah-langkah yang harus diambil termasuk memperkuat regulasi dan meningkatkan keterlibatan lembaga-lembaga independen dalam pemantauan</p>

	<p>Anda perlu diambil untuk meningkatkan keadilan dalam sistem perpajakan setelah kasus korupsi ini? Adakah reformasi yang Anda harapkan?</p> <p>3. Pengawasan dan Penegakan Hukum</p> <p>Bagaimana Anda menilai efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap pejabat pajak setelah kasus ini? Apakah Anda merasa ada perbaikan dalam hal ini?</p>	<p>sistem perpajakan untuk mencegah terjadinya korupsi di masa depan.</p> <p>3. Pengawasan tampaknya membaik setelah kasus ini, tetapi penegakan hukum terhadap pejabat pajak masih perlu ditingkatkan. Penegakan hukum harus lebih konsisten untuk memastikan tidak ada ruang untuk penyimpangan.</p>
4.	<p>Regulasi dan Kebijakan</p> <p>1. Kebijakan Pemerintah</p> <p>Apakah Anda merasa bahwa kebijakan pemerintah saat ini cukup efektif untuk mencegah korupsi di kalangan pejabat pajak? Adakah perubahan kebijakan yang Anda rasa diperlukan?</p> <p>2. Dukungan dan Transparansi</p> <p>Apa bentuk dukungan atau transparansi yang menurut Anda perlu ditingkatkan oleh pemerintah untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan?</p>	<p>1. Saya rasa kebijakan pemerintah saat ini belum cukup untuk mencegah korupsi di kalangan pejabat pajak. Diperlukan kebijakan yang lebih proaktif, seperti peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak.</p> <p>2. Pemerintah perlu memperkuat transparansi dengan mempublikasikan hasil evaluasi dan reformasi kebijakan perpajakan secara berkala. Ini akan menunjukkan komitmen terhadap perbaikan sistem perpajakan.</p>

5.	<p>Kesejahteraan Ekonomi dan Komunitas</p> <p>1. Dampak Ekonomi Lokal</p> <p>Menurut Anda, bagaimana dampak kasus korupsi ini terhadap kesejahteraan ekonomi di komunitas Anda? Apakah Anda melihat dampak negatif yang signifikan?</p> <p>2. Pendidikan dan Kesadaran</p> <p>Apakah Anda merasa bahwa ada cukup informasi atau pendidikan mengenai integritas pajak dan antikorupsi di masyarakat Anda? Apa jenis pendidikan tambahan yang Anda rasa diperlukan?</p>	<p>1. Saya melihat dampak negatif dalam bentuk ketidakadilan ekonomi. Korupsi menyebabkan ketidakmerataan distribusi sumber daya dan memperburuk kesenjangan ekonomi di komunitas kami.</p> <p>2. Saya merasa pendidikan antikorupsi perlu lebih terintegrasi dalam kurikulum pendidikan formal dan pelatihan profesional. Mengajarkan etika dan integritas sejak dini akan membangun fondasi yang kuat untuk masa depan.</p>
6.	<p>Saran dan Penutup</p> <p>1. Rekomendasi untuk Pemerintah</p> <p>Berdasarkan pandangan Anda, apa rekomendasi atau saran yang bisa Anda berikan kepada pemerintah untuk mengatasi dampak kasus korupsi dan memperbaiki sistem perpajakan?</p> <p>2. Harapan untuk Masa Depan</p> <p>Apa harapan Anda terkait dengan reformasi perpajakan dan pengelolaan pajak di masa depan setelah terjadinya kasus ini?</p>	<p>1. Meningkatkan transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk memastikan bahwa semua transaksi dilakukan secara adil dan sesuai prosedur, mengurangi kemungkinan korupsi.</p> <p>2. Harapan saya adalah adanya perbaikan dalam koordinasi antara berbagai lembaga pemerintah yang terlibat dalam pengelolaan pajak. Reformasi harus mencakup pembentukan mekanisme yang lebih baik</p>

	<p>3. Pernyataan Penutup</p> <p>Apakah ada hal lain yang ingin Anda tambahkan atau sampaikan mengenai dampak kasus korupsi pejabat pajak terhadap kepercayaan masyarakat dan keadilan perpajakan?</p>	<p>untuk kolaborasi dan komunikasi antar lembaga.</p> <p>3. Harapan saya adalah agar reformasi perpajakan tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga pada peningkatan budaya kerja dan etika di lingkungan perpajakan untuk memastikan keadilan dan kepercayaan masyarakat.</p>
--	---	--



I. Identitas Narasumber (15)

- a. Nama : I Putu Agus Yudi Saputra
 b. Umur : 30 Tahun
 c. Jenis Kelamin : Laki-laki
 d. Agama : Hindu
 e. Alamat : Banjar Sawe
 f. Pekerjaan/Profesi : PNS

II. Instrumen Wawancara

NO	DIMENSI YANG DI WAWANCARAI	HASIL DOKUMENTASI
1.	<p>Pengantar dan Latar Belakang</p> <p>1. Pengantar Profesi Bisakah Anda menjelaskan jenis usaha atau profesi Anda serta seberapa lama Anda telah terlibat dalam kegiatan perpajakan?</p> <p>2. Pemahaman tentang Kasus Apakah Anda mengetahui tentang kasus korupsi pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo? Jika ya, bagaimana Anda pertama kali mengetahui tentang kasus ini dan apa pemahaman awal Anda tentang situasi tersebut?</p> <p>3. Apakah selama ini penghasilan dilaporkan sesuai dengan aslinya atau tidak?</p>	<p>1. Saya seorang PNS. Saya terlibat dalam kegiatan perpajakan dengan melaporkan penghasilan dan mematuhi kewajiban pajak lainnya.</p> <p>2. Kasus ini pertama kali saya ketahui dari berita yang muncul di televisi saat saya sedang bekerja. Pemahaman awal saya adalah bahwa Rafael Alun Trisambodo dituduh melakukan korupsi besar, dan hal ini tentu mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap lembaga perpajakan.</p> <p>3. Saya melaporkan penghasilan dengan benar memberikan rasa tenang dan saya merasa lebih bertanggung jawab sebagai warga negara.</p>
2.	Dampak Terhadap Kepercayaan Masyarakat	1. Kasus korupsi mempengaruhi kepercayaan

	<p>1. Persepsi Terhadap Kepercayaan Bagaimana menurut Anda kasus korupsi ini mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap instansi pajak? Apakah Anda merasa kepercayaan masyarakat terhadap pejabat pajak berkurang?</p> <p>2. Pengaruh Terhadap Kepatuhan Pajak Apakah Anda merasa bahwa kasus ini mempengaruhi kepatuhan Anda dan masyarakat lainnya dalam memenuhi kewajiban pajak? Jika ya, dalam hal apa pengaruh tersebut terlihat?</p> <p>3. Reaksi Masyarakat Apa reaksi yang Anda amati dari masyarakat sekitar mengenai kasus korupsi ini? Adakah perubahan signifikan dalam pandangan mereka terhadap sistem perpajakan?</p>	<p>masyarakat karena menunjukkan bahwa ada masalah dalam sistem. Jika pejabat pajak terlibat, masyarakat menjadi lebih sulit untuk percaya pada sistem perpajakan secara keseluruhan</p> <p>2. Saya merasa bahwa kasus korupsi mempengaruhi kepatuhan pajak. Ada rasa ketidakadilan yang membuat orang menjadi lebih enggan untuk patuh pada kewajiban pajak mereka.</p> <p>3. Saya melihat bahwa kasus korupsi ini membuat masyarakat merasa bahwa sistem perpajakan perlu ditingkatkan. Ada dorongan untuk memperbaiki transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak.</p>
3.	<p>Keadilan Perpajakan</p> <p>1. Persepsi Keadilan</p> <p>Menurut Anda, bagaimana kasus korupsi ini mempengaruhi persepsi Anda tentang keadilan dalam sistem perpajakan di Indonesia? Apakah Anda merasa ada ketidakadilan yang lebih besar setelah kasus ini terungkap?</p>	<p>1. Saya merasa kasus korupsi ini memperjelas adanya ketidakadilan dalam sistem perpajakan. Jika pejabat pajak bisa melakukan korupsi tanpa konsekuensi yang jelas, itu menunjukkan bahwa sistem ini belum sepenuhnya adil.</p> <p>2. Saya berharap ada reformasi</p>

	<p>2. Langkah-Langkah Perbaikan</p> <p>Apa langkah-langkah yang menurut Anda perlu diambil untuk meningkatkan keadilan dalam sistem perpajakan setelah kasus korupsi ini? Adakah reformasi yang Anda harapkan?</p> <p>3. Pengawasan dan Penegakan Hukum</p> <p>Bagaimana Anda menilai efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap pejabat pajak setelah kasus ini? Apakah Anda merasa ada perbaikan dalam hal ini?</p>	<p>dalam sistem rekrutmen dan pelatihan pejabat pajak untuk menekankan pentingnya integritas dan transparansi. Juga, perlunya peningkatan mekanisme audit dan kontrol untuk memastikan keadilan dalam sistem perpajakan.</p> <p>3. Saya melihat adanya perbaikan dalam pengawasan dan penegakan hukum, tetapi perubahan ini belum sepenuhnya memadai. Masih ada banyak aspek yang perlu diperbaiki untuk memastikan bahwa sistem perpajakan lebih adil dan transparan.</p>
4.	<p>Regulasi dan Kebijakan</p> <p>1. Kebijakan Pemerintah</p> <p>Apakah Anda merasa bahwa kebijakan pemerintah saat ini cukup efektif untuk mencegah korupsi di kalangan pejabat pajak? Adakah perubahan kebijakan yang Anda rasa diperlukan?</p> <p>2. Dukungan dan Transparansi</p> <p>Apa bentuk dukungan atau transparansi yang menurut Anda perlu ditingkatkan oleh pemerintah untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem</p>	<p>1. Kebijakan pemerintah saat ini masih kurang efektif. Perubahan yang diperlukan adalah peningkatan transparansi dalam proses perekrutan dan promosi pejabat pajak serta penegakan hukum yang lebih tegas.</p> <p>2. Dukungan yang diperlukan termasuk memperkenalkan sistem pelaporan yang memudahkan masyarakat untuk melaporkan ketidakpatuhan pajak dan mendapatkan feedback yang</p>

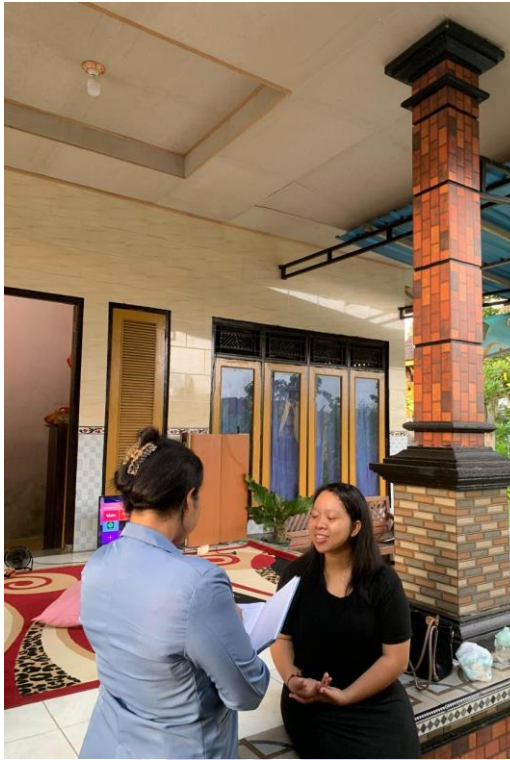
	perpajakan?	jelas tentang tindak lanjutnya.
5.	<p>Kesejahteraan Ekonomi dan Komunitas</p> <p>1. Dampak Ekonomi Lokal</p> <p>Menurut Anda, bagaimana dampak kasus korupsi ini terhadap kesejahteraan ekonomi di komunitas Anda? Apakah Anda melihat dampak negatif yang signifikan?</p> <p>2. Pendidikan dan Kesadaran</p> <p>Apakah Anda merasa bahwa ada cukup informasi atau pendidikan mengenai integritas pajak dan antikorupsi di masyarakat Anda? Apa jenis pendidikan tambahan yang Anda rasa diperlukan?</p>	<p>1. Saya melihat dampak negatif dalam bentuk ketidakadilan ekonomi. Korupsi menyebabkan ketidakmerataan distribusi sumber daya dan memperburuk kesenjangan ekonomi di komunitas kami.</p> <p>2. Informasi tentang pajak dan antikorupsi sering kali tidak cukup menjelaskan keuntungan jangka panjang dari kepatuhan. Pendidikan tambahan yang menyoroti manfaat konkret dan studi kasus sukses bisa memberikan dorongan yang diperlukan.</p>
6.	<p>Saran dan Penutup</p> <p>1. Rekomendasi untuk Pemerintah</p> <p>Berdasarkan pandangan Anda, apa rekomendasi atau saran yang bisa Anda berikan kepada pemerintah untuk mengatasi dampak kasus korupsi dan memperbaiki sistem perpajakan?</p> <p>2. Harapan untuk Masa Depan</p> <p>Apa harapan Anda terkait dengan reformasi perpajakan dan pengelolaan pajak di masa depan</p>	<p>1. Pemerintah harus melakukan evaluasi dan peninjauan secara berkala terhadap kebijakan dan praktik perpajakan yang ada. Penyesuaian kebijakan berdasarkan temuan evaluasi akan membantu memperbaiki sistem perpajakan secara berkelanjutan.</p> <p>2. Saya berharap pemerintah akan fokus pada penguatan</p>

	<p>setelah terjadinya kasus ini?</p> <p>3. Pernyataan Penutup</p> <p>Apakah ada hal lain yang ingin Anda tambahkan atau sampaikan mengenai dampak kasus korupsi pejabat pajak terhadap kepercayaan masyarakat dan keadilan perpajakan?</p>	<p>sistem pengaduan dan perlindungan bagi pelapor yang melaporkan dugaan korupsi atau penyalahgunaan dalam sistem perpajakan, untuk memastikan bahwa semua laporan ditindaklanjuti dengan serius dan adil.</p> <p>3. Akhir kata, saya ingin menekankan bahwa penanganan kasus korupsi harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Reformasi yang komprehensif dan kolaboratif akan lebih efektif dalam memperbaiki sistem perpajakan dan membangun kembali kepercayaan.</p>
--	--	--



Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian







PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Analisis Dampak Kasus Korupsi Pejabat Pajak Terhadap Kepercayaan Masyarakat dan Keadilan Perpajakan (Studi Kasus Pada Kasus Korupsi Pejabat Pajak Ragael Alun Trisambodo**” beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.



Singaraja, 11 Desember 2024
Yang membuat pernyataan,

I Gusti Ayu Wika Irmayanti
NIM 2017051079

RIWAYAT HIDUP



I Gusti Ayu Kade Wika Irmayanti lahir di Jembrana pada tanggal 02 November 2002. Anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan suami istri Bapak I Gusti Komang Wiratdika dan Ibu I Dewa Ayu Ketut Kariadi. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Hindu. Alamat Penulis di Banjar Petanahan, Desa Batuagung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana. Penulis menyelesaikan Pendidikan Dasar di SD N 1 Dauhwaru dan lulus pada tahun 2014. Kemudian Penulis melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP N 1 Negara dan lulus pada tahun 2017. Pada tahun 2020 lulus dari SMA N 2 Negara Jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan melanjutkan Pendidikan Strata 1 Program Studi S1 Akuntansi. Jurusan Ekonomi dan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Pendidikan Ganesha. Pada tahun 2024 penulis menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Dampak Kasus Korupsi Pejabat Pajak Terhadap Kepercayaan Masyarakat dan Keadilan Perpajakan (Studi Kasus Pada Kasus Korupsi Pejabat Pajak Ragael Alun Trisambodo”.

